



bkkbn



RENCANA STRATEGIS 2024-2026



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGKA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dalam rangka ikut serta dalam mewujudkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 disusun sesuai tahapan dan tata cara berdasarkan Intruksi Mendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan mengacu pada Peraturan Bupati Bangka Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A Kabupaten Bangka.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 berisi Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang merupakan upaya yang harus diwujudkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien.

Akhir kata dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA), semoga dapat memberikan manfaat bagi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka (khususnya) dan Pemerintah Kabupaten Bangka (umumnya).

Sungailiat, 10 April 2023
Kepala DP2KBP3A Kab. Bangka,



NURITA, S.Sos
PEMBINA Tk.I
NIP. 19641103 198903 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	12
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	35
2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	35
2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	35
2.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah	35
BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	37
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	37
3.2. Isu Strategis.....	42
BAB IV Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	47
4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	47
4.1.a. Tujuan dan Sasaran DP2KBP3A	47
4.1.b. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	48
4.2. Cascading Perangkat Daerah	50
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	53
5.1. Strategi Perangkat Daeah	53
5.2. Kebijakan Perangkat Daerah.....	54
BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan	57
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	101
7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 Melalui IKU	101
7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikaor Kunci (IKK) Bagi PD Pemangku Urusan Pemerintah Daerah.....	102
BAB VIII Penutup	104

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan pada masa mendatang. Perencanaan Strategis merupakan Keputusan Manajemen yang telah direncanakan sebelumnya mengenai tujuan yang ingin dicapai pada masa depan, cara bertindak, dengan memanfaatkan alokasi sumber-sumber yang tersedia.

Dalam rangka mencapai tujuan bernegara semua komponen bangsa harus berupaya dalam melaksanakan Pembangunan Nasional. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan Pembangunan Nasional, dan untuk menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai suatu organisasi yang baru maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka dengan mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka. Perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan, pembuatan program dan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melibatkan semua unsur seperti masyarakat, lembaga kemasyarakatan, serta instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya sehingga semua dapat berperan serta dalam tugas-tugas pembangunan.

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategik, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan merupakan dokumen perencanaan yang memuat dan menggambarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara

bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan sumber daya yang dimiliki organisasi.

Perencanaan berfungsi sebagai pedoman kerja, dapat memusatkan perhatian dan tindakan, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Perencanaan dapat menjadi penghubung antara masa kini dan masa yang akan datang, yang memungkinkan penggunaan sumber-sumber sebaik mungkin dalam mengabdikan kepada tujuan yang diinginkan.

Fungsi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk mengarahkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tiga tahun. Kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal ini mencakup penyelenggaraan 2 (dua) urusan pemerintahan yakni urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

Tahapan penyusunan Renstra SKPD meliputi: (a) persiapan penyusunan Renstra PD; (b) penyusunan rancangan Renstra PD; (c) penyusunan rancangan akhir Renstra PD; dan (d) penetapan Renstra PD.

Persiapan penyusunan Renstra PD, antara lain meliputi: pembentukan tim penyusun Renstra PD; orientasi mengenai Renstra PD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rancangan Renstra PD, melalui tahapan: Perumusan rancangan Renstra PD; dan Penyajian rancangan Renstra PD. Penyusunan rancangan akhir Renstra PD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra PD, yang berpedoman pada RPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

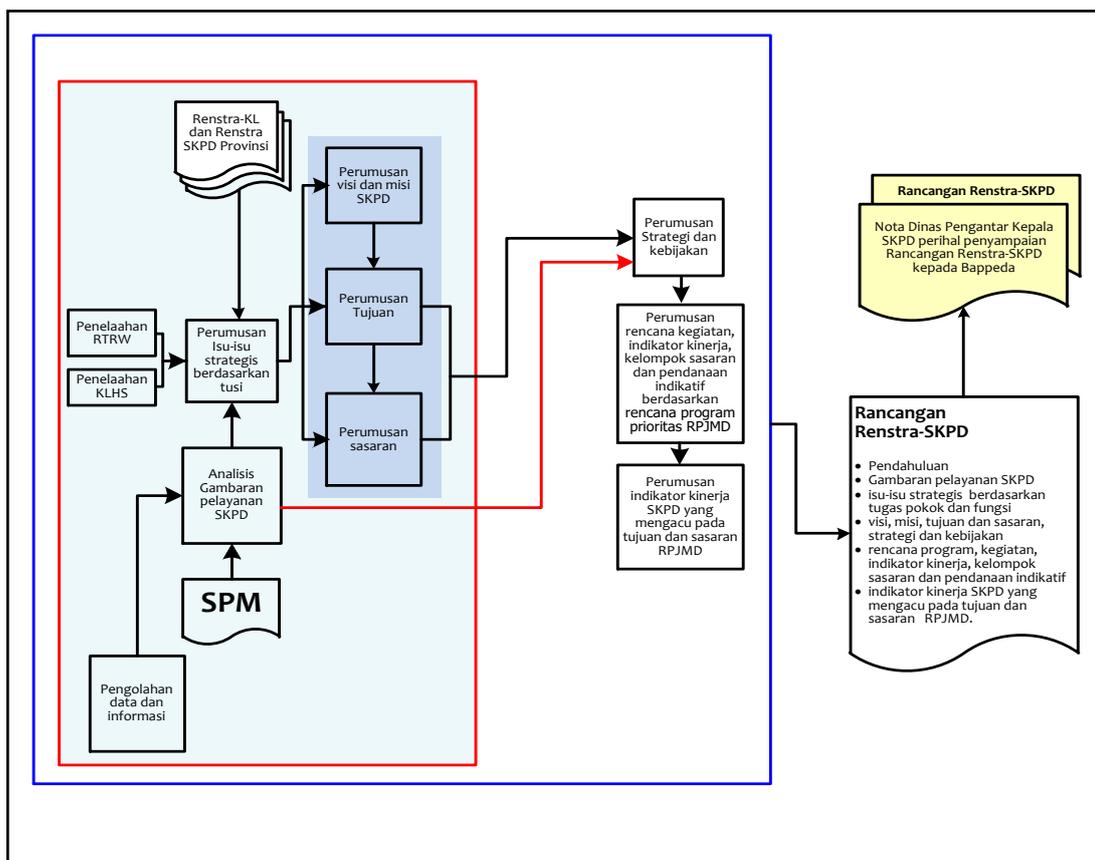
Penetapan Renstra PD dilakukan setelah mendapat Pengesahan kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra PD, Kepala PD menetapkan Renstra PD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja PD.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
11. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
30. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
31. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
34. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
35. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);

43. Peraturan Bupati Bangka Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A Kabupaten Bangka.
44. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
45. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bangka yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, Kelompok Sasaran Layanan, Mitra Perangkat Daerah Dalam memberikan Pelayanan, Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD,

serta Kerjasama Dearah yang Menjadi tanggungjawab PD.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta Cascading Kinerja Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam Perangkat Daerah mencapai target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui IKU dan Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerinta Daerah Tahun 2024-2026 Melalui Indikaror Kinerja Kunci (IKK)

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A Kabupaten Bangka, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi yang menangani urusan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A mempunyai fungsi :

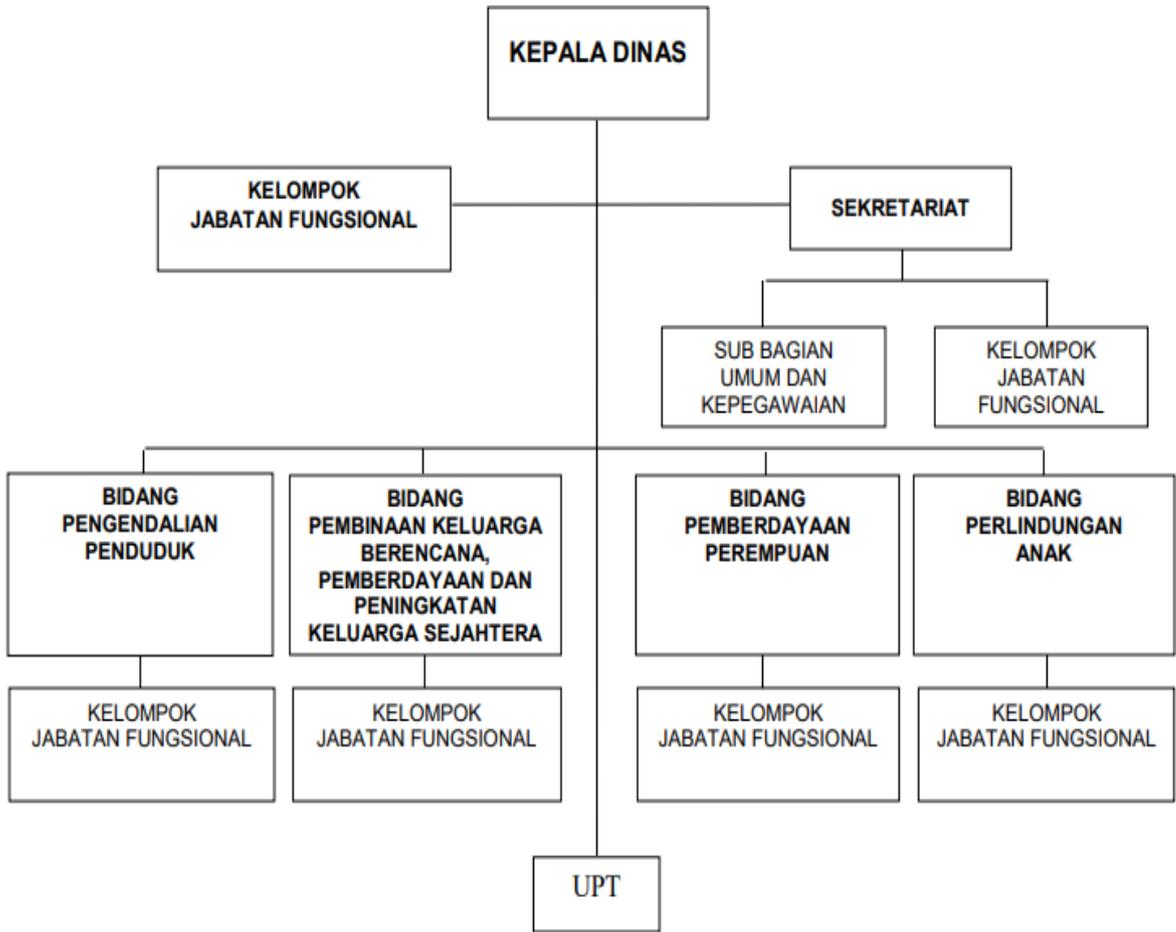
1. berencana meliputi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, system data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
2. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana meliputi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, system data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana meliputi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, system data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;

4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. pembinaan UPTD ; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGKA



Sumber : Peraturan Bupati Bangka Nomor 96 Tahun 2021

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka didukung oleh pegawai dan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Organisasi Perangkat Daerah Per 1 April 2023

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	2	-	2
2	SMA Sederajat	-	5	10	8	23
3	D3	1	4	-	7	12
4	S1	2	15	5	11	33
5	S2	-	4	-	-	4
6	S3	-	-	-	-	-
	Jumlah	3	28	17	26	73

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagian besar berpendidikan S1 dengan kualifikasi ASN.

Sedangkan kondisi pegawai ditinjau dari tingkat Pangkat dan Golongan adalah sebagai berikut : Golongan II 2 Orang, Golongan III 24 orang, Golongan IV 5 orang. Dengan demikian sebagian besar pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didominasi oleh pegawai golongan III yaitu sebanyak 24 orang. Atau secara jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan
di Organisasi Perangkat Daerah Per 1 April 2023

No	Pangkat/Golongan	L	P	Jumlah
1	Pengatur Muda/ Iia	-	-	-
	Pengatur Muda Tk.I/ Iib	-	1	1
	Pengatur/ Iic	-	-	-
	Pengatur Tk. I/ Iid	-	1	1
2	Penata Muda/ IIIa	-	1	1
	Penata Muda Tk. I/ IIIb	2	3	5

	Penata / IIIc	~	4	4
	Penata Tk.I/ IIIId	1	13	14
3	Pembina/ IVa	~	4	4
	Pembina Tk.I/ IVb	~	~	~
	Pembina Utama Muda/ IVc	~	1	1
	Pembina Utama Madya/ IVd	~	~	~
	Pembina Utama/IVe	~	~	~
	Jumlah	3	28	31

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Per 1 April 2023

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Gedung Kantor	1	V	~
2	Gudang Obat	1	V	~
3	Gedung Balai Penyuluh Keluarga Berencana beserta Perlengkapannya	8	V	~
4	Kendaraan Dinas Operasional	1	V	~
5	Mobil Unit Penerangan	1	V	~
6	Mobil Unit Pelayanan	1	V	~
7	Mobil Pengangkut akseptor Keluarga Berencana	1	V	~
8	Mobil Perlindungan	1	V	~
8	Sepeda Motor	14	12	2
9	Komputer PC	6	5	1
10	Laptop	5	V	~
11	Printer	3	V	~
12	Meja kerja	20	V	~
13	Kursi kerja	20	17	3
14	Tempat Parkir	2	V	~
15	Jaringan WIFI	1	V	~
16	Kursi Tamu (Sofa)	1	V	~
17	Dispenser	1	~	1
18	Mesin Rumput	2	1	1
19	Tangki semprot	1	~	1
20	Meja Rapat	2	1	1

Secara umum semua kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka dalam kondisi baik, namun masih banyak terdapat kekurangan terutama sarana pendukung kerja seperti meja dan kursi Kerja pegawai, hingga sampai saat ini masih banyak lebih dari (40%) pegawai tidak memiliki meja dan kursi, meja kursi yang digunakan sekarang inipun mayoritas dalam kondisi kurang baik dan tidak memenuhi standar jabatan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Cakupan Peserta Keluarga Berencana Aktif	%			69,86	80	74,87	71,46	86,67	81	77,90	72,12	124,06%	101,25%	104,05%	100,92%
2	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-Keluarga Berencana tidak terpenuhi (Unmet Need) 12 %	%			15,51	12,76	11,15	10,85	11,55	8,45	10,18	10,18	125,53%	133,78%	108,70%	106,18%
3	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%			5,51	5,31	0	0	2,79	2,99	0	0	149,36%	143,69%	0	0
5	Rata rata jumlah anak per keluarga	%			1,72	1,67	1,62	1,58	1,55	0,89	1,62	1,58	109,88%	146,71%	100,00%	100,00%
6	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Rasio KDRT	%			0,19	0,19	0,17	0,15	0,04	0,03	0,02	0,0001	178,95%	184,21%	188,24%	199,93%
8	Skor Kabupaten Layak Anak	Angka			500	500	700	800	560	560	611	0	112,00%	112,00%	87,29%	0,00%

RENSTRA DPPKBPPA KAB. BANGKA TAHUN 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
9	Indek Pembangunan Gender (IPG)	%			87,17	87,17	87,4	87,5	87,17	87,17	87,4	87,5	100	100	100	100
10	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	%			61,32	61,32	62,45	62,75	61,32	61,32	62,45	62,75	100	100	100	100

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2019-2022 (Renstra Periode yang Lalu)

Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1.516.430.000,00	1.417.911.500,00	-	-	1.426.813.195,00	1.383.764.265,00	-	-	94,09%	97,59%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.148.540.000,00	487.400.000,00	-	-	909.028.000,00	448.175.396,00	-	-	79,15%	91,95%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.800.000,00	-	-	-	9.800.000,00	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000,00	-	-	-	29.903.000,00	-	-	-	99,68%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2021-2023

Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Realisasi Kinerja SKPD												
Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah	10.000.000,00	-	-	-	8.725.000,00	-	-	-	87,25%	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	3.786.579.000,00	3.200.511.000,00	-	-	2.703.657.625,00	3.131.010.716,00	-	-	71,40%	97,83%	0,00%	0,00%
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	358.415.500,00	466.571.000,00	-	-	347.444.560,00	405.714.616,00	-	-	96,94%	86,96%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	75.000.000,00	21.945.000,00	-	-	65.800.880,00	12.171.885,00	-	-	87,73%	55,47%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	-	37.325.000,00	-	-	-	33.893.690,00	-	-	0,00%	90,81%	0,00%	0,00%
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	-	85.798.000,00	-	-	-	82.907.550,00	-	-	0,00%	96,63%	0,00%	0,00%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.739.762.404,00	6.274.694.120,00	-	-	5.063.242.939,00	5.236.834.811,00	0,00%	0,00%	88,21%	83,46%

RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2021-2023

Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Kabupaten/Kota												
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	-	-	190.180.400,00	195.058.000,00	-	-	182.649.100,00	187.766.662,00	0,00%	0,00%	96,04%	96,26%
Program Perlindungan Perempuan	-	-	118.190.000,00	364.747.000,00	-	-	103.295.500,00	157.618.700,00	0,00%	0,00%	87,40%	43,21%
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	-	-	35.000.000,00	4.965.505,00	-	-	34.206.000,00	4.965.500,00	0,00%	0,00%	97,73%	100,00%
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	-	-	194.056.500,00	194.379.495,00	-	-	183.917.015,00	177.315.813,00	0,00%	0,00%	94,77%	91,22%
Program Perlindungan Khusus Anak	-	-		362.053.000,00	-	-	-	214.573.191,00	0,00%	0,00%	0,00%	59,27%
Program Pengendalian Penduduk	-	-	23.020.000,00	151.757.400,00	-	-	22.295.050,00	112.641.000,00	0,00%	0,00%	96,85%	74,22%
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	-	-	3.185.232.000,00	2.353.339.300,00	-	-	3.059.800.997,00	2.251.517.724,00	0,00%	0,00%	96,06%	95,67%
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	-	-	935.400.000,00	1.721.040.000,00	-	-	910.934.790,00	1.012.059.000,00	0,00%	0,00%	97,38%	58,81%

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Cakupan Akseptor Keluarga Berencana

Cakupan peserta Keluarga Berencana aktif adalah banyaknya persentase Pusangan Usia Subur (PUS) yang uisanya 20-49 menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Kondisi capaian akseptor Keluarga Berencana dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 2.6
Cakupan Akseptor Keluarga Berencana Aktif

No	Tahun	Satuan	Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2019	%	69,86	86,67	124,06
2	2020	%	80	81	101,25
3	2021	%	74,87	77,90	96%
4	2022	%	71,46	72,12	100,92

2. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) ingin ber-Keluarga Berencana tidak terpenuhi (Unmeet Need)

Tabel 2.8
Cakupan Unmeet Need

No	Tahun	Satuan	Target	Capaian	Tingkat Capaian
1	2019	%	15,51	4,80	30,95
2	2020	%	4,8	4,8	100
3	2021	%	11,15	10,18	109
4	2022	%	10,18	10,18	100

3. Cakupan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Tabel 2.9
Cakupan Keluarga Prasejahteraa dan Sejahtera I

No	Tahun	Satuan	Target	Capaian	Tingkat Capaian
1	2019	%	5,51	2,79	149,36
2	2020	%	2,79	2,79	100

2. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender

(IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

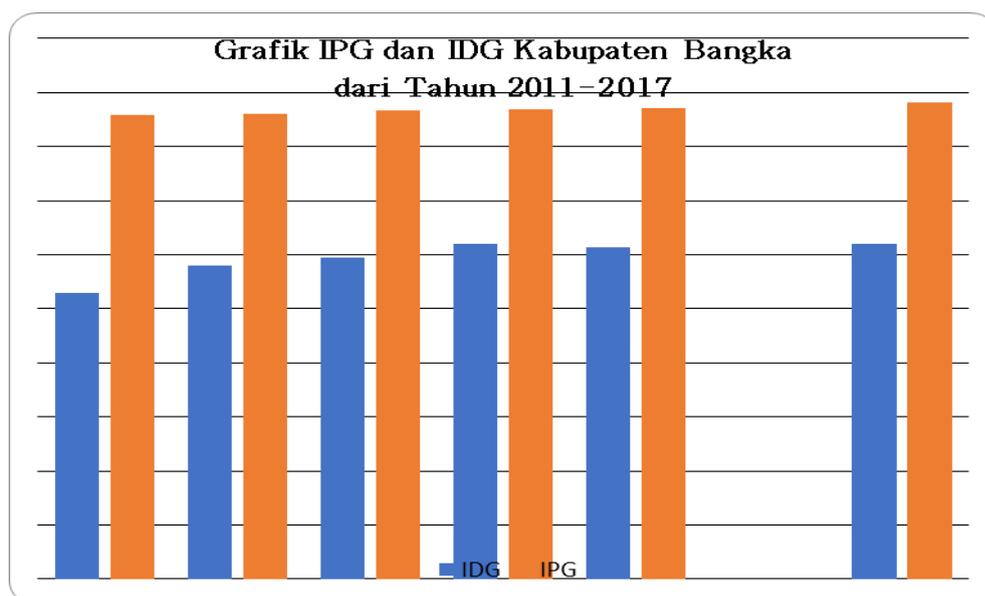
Capaian IPG Kabupaten Bangka pada tahun 2012 : 60,75 dan pada tahun 2013 naik menjadi 61, 65. Sedangkan Indek Kesetaraan gender (IDG) pada tahun 2012 : 58,07 dan pada tahun 2013 naik menjadi 59,40.

Tabel 2.10
Capaian Indek Pembangunan Gender dan Indek Kesetaraan Gender dari Tahun 2011-2017
Kabupaten Bangka

No	Tahun	Satuan	Target	Capaian	
				IPG	IDG
1	2019	%	61,04	--	61,04
2	2020	%	64,50	--	64,50

Jika dilihat dari tabel di atas baik IPG dan IDG mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Angka kenaikan ini di dukung oleh Kegiatan Sosialisasi PPRG kepada Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Bangka.

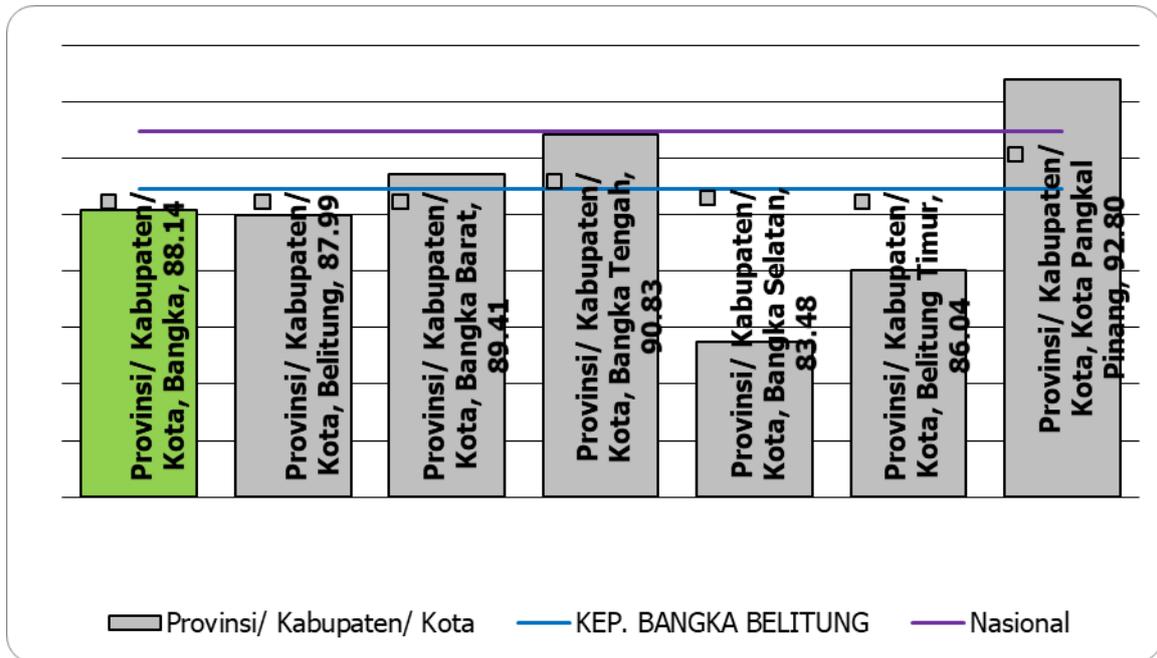
Tabel 2.11
Grafik IPG dan IDG Kabupaten Bangka
dari Tahun 2011-2017



Dari grafik di atas menunjukkan bahwa : IPG dari Tahun 2011-2015 mengalami kenaikan rata-rata 17,31 persen pertahun, sedangkan untuk IDG mengalami kenaikan rata-rata 11,75 persen pertahun.

Tabel 2.12

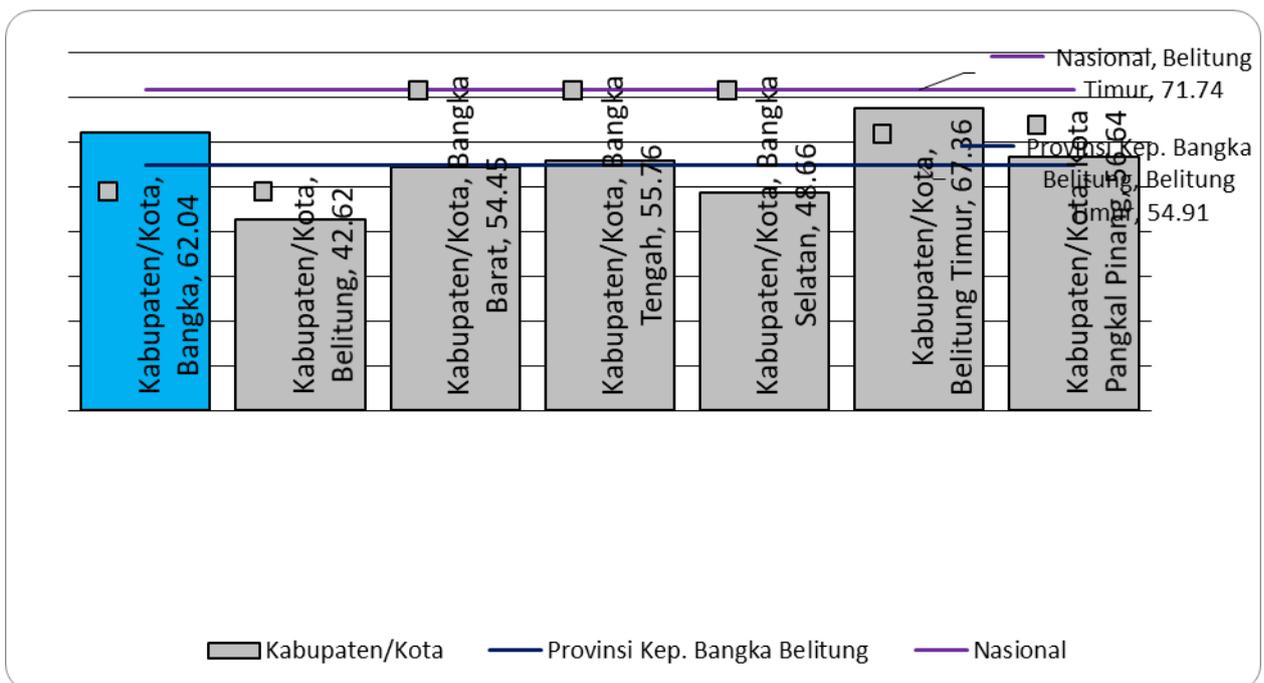
Perbandingan Grafik IPG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Bangka pada IPG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di posisi ke lima (5)

Tabel 2.13

Perbandingan Grafik IDG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Bangka berada di posisi ke dua (2) IDG se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas yang bergerak di Bidang Pelayanan Dasar. Hal ini sejalan dengan Tugas dan Fungsi Dinas P2KBP3A.

Kelompok sasaran Layanan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kelompok masyarakat, yang mana masyarakat dalam hal membutuhkan pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi, Konseling Pengasuhan Anak dan perempuan korban kekerasan dapat menghubungi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau ke Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang terdapat di setiap Kecamatan

2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam hal kemitraan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Faskes dan Fayaskes yang ada di Kabupaten Bangka. Untuk mencapai target Pelayanan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga bekerjasama dengan TNI, Polri, PKK, serta Stekholder terkait dengan Pelayanan.

Selain Faskes dan Fayaskes, Kantor Kementerian Agama juga merupakan Mitra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal pencegahan pernikahan Anak di bawah umur dan untuk menurunkan Anak berisiko Stunting.

2.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja PD

Dukungan BUMD merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam hal keberhasilan pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Banyak bantuan-bantuan yang diberikan dalam pencapaian kinerja.

2.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab PD

Kerjasama yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka dengan beberapa mitra adalah sebagai berikut:

No	Mitra	Isi Mou	Nomor Mou	Yang Menandatangani Mou	Tanggal Mulai Mou	Tanggal Berakhir Mou
1	TK Pertiwi Sungailiat	Peningkatan Sinergitas Perlindungan Anak serta Tindakan Pidana Perdagangan Orang Berbasis Ilmu Pendidikan Tingkat Dasar di Usia Dini	- 479.6/475/DP2 KBP3A/2023 - 66/TKP/1/2023	Bupati Bangka dengan Kepala Sekolah TK Pertiwi Sungailiat Kabupaten Bangka	2 Mei 2023	2 Mei 2025
2	ASPIKOM KORWIL Provinsi	Peningkatan Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-/557/DP2K BP3A/2022 -/...../ASPIKOM KORWIL	Bupati Bangka dengan Ketua ASPIKON	21 November 2022	21 November 2024

RENSTRA DPPKBPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

	Kepulauan Bangka Belitung	serta Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Ilmu Pendidikan Dasar dan Penguatan Akademik	BABEL/2022	KORWIL BABEL		
3	PKK Kabupaten Bangka	Peningkatan Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Perlindungan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera	- 4796/554/DP2 KBP3A/2022 - 162.a/SKR/PKK KAB.BKA/ 2022	Bupati Bangka dengan Ketua PKK Kabupaten Bangka	21 November 2022	21 November 2024
4	LPP RI Sungailiat	Peningkatan Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Penyiaran dan Pemberitaan Media Elektronik di Kabupaten Bangka	-/556/DP2KB P3A/2022 -/...../ LPP RRI SUNGAILIAT/ 2022	Bupati Bangka dengan Kepala LPP RRI Sungailiat	21 November 2022	21 November 2024
5	Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Bangka	Peningkatan Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Pemberitaan Media Massa	- 479.6/555/DP 2KBP3A/2022 - 05/PWI-BKA/X/2022	Bupati Bangka dengan Ketua PWI Kabupaten Bangka	21 November 2022	21 November 2024
6	Forum Kerukunan Umat Beragama Bangka	Peningkatan Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Bangka	- 479.6/553/DP 2KBP3A/2022 - 04/FKUB-BKA/XI/2022	Bupati Bangka dengan Kepala Forum Kerukunan Umat Beragama Bangka	21 November 2022	21 November 2024
7	PAUD Islam Terpadu Amaliyah	Perlindungan Anak	- 479.6/DP2KB P3A/2021 - 45.A/PAUD.IT /YAM/III/ 2021	Kepala DP2KBP3A Kabupaten Bangka dengan Pengelola PAUD Islam Terpadu Amaliyah	8 Maret 2021	8 Maret 2025
8	RA Al Hidayah Cendrawasih	Perlindungan Anak	- 479.6/001.B/ DP2KBP3A/ 2022 - 104/RA AHC/I/2022	Kepala DP2KBP3A Kabupaten Bangka dengan Pengelola RA Al Hidayah Cendrawasih	3 Januari 2022	3 Januari 2025
9	Puskesmas Sinar Baru	Kerjasama Pelaksanaan Penggerakan Pelayanan KB melalui Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sub Bidang KBKS Tahun Anggaran 2023	- 415.4/72.A/ DP2KBP3A/ 2023	Kepala DP2KBP3A Kabupaten Bangka dengan Kepala Puskesmas Sinar Baru	20 Februari 2023	20 Februari 2024

**BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- A. Permasalahan Terkait Kesekretariatan:
- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - 2) Rendahnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- B. Permasalahan Terkait Pelayanan Keluarga Berencana
- 1) Rendahnya mutu SDM tenaga lini lapangan sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan program di tingkat lini lapangan.
 - 2) Masih tingginya *Total Fertility Rate (TFR)*
 - 3) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja akan hak-hak reproduksi.
 - 4) Rendahnya cakupan peserta Keluarga Berencana MKJP
 - 5) Masih rendahnya usia kawin pertama penduduk.
 - 6) Rendahnya partisipasi pria dalam ber-Keluarga Berencana.
 - 7) Masih lemahnya institusi daerah dalam pelaksanaan Program Pembinaan Keluarga Berencana.
 - 8) Masih Lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga.
 - 9) Belum optimalnya keberadaan kelompok-kelompok kegiatan di tingkat Kecamatan
 - 10) Belum optimalnya kesertaan ber-Keluarga Berencana bagi anggota kelompok Tribina
 - 11) Kurangnya Modal dalam usaha ekonomi.
- C. Permasalahan Terkait Kesenjangan dan Keadilan Gender:
- 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 - 2) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - 3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - 4) Rendahnya partisipasi dan peran perempuan dalam bidang pembangunan
 - 5) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - 6) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
 - 7) Belum semua PD menyusun PPRG

- D. Permasalahan Terkait Perlindungan Hak Perempuan:
- 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - 2) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
 - 3) Tingginya angka perceraian
- E. Permasalahan Terkait Perlindungan Anak:
- 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
 - 3) Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 4) Rendahnya tingkat kesejahteraan dan perlindungan anak.
 - 5) Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk partisipasi masyarakat.
 - 6) Belum tersedia data gender dan anak
- F. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
- 1) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
 - 2) Tingginya perkawinan dibawah umur
 - 3) Tingginya kasus perceraian.
 - 4) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - 5) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
 - 6) Terbatasnya SDM perlindungan Anak yang terlatih
- G. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya
(Pilkada tahun 2024-2026)

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPPA	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Rendah partisipasi dan peran perempuan dalam bidang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengimplementasian penghapusan diskriminasi terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan

		<p>pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan • Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak • Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal • Menurunnya pendapatan perempuan terutama pada pelaku usaha Mikro, UKMM/IKM akibat pandemi Covid-19 • Belum semua PD menyusun PPRG • 	<p>perempuan dilapangan pekerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum responsif gendernya pandangan sebagian masyarakat terhadap perempuan • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya pemasaran hasil usaha UMKM dikarenakan pandemi Covid-19 yang meluas. 	<p>Perempuan melalui peraturan dan kebijakan pemerintah yang sensitif dan responsif gender.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui kesepemahaman bersama. • Adanya penayangan/pemberitaan media mengenai kemajuan dan pemberdayaan perempuan. • Adanya kerjasama dengan berbagai pihak instansi untuk memberdayakan usaha UMKM
2	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya capaian beberapa indikator pemenuhan hak anak di berbagai tingkat kecamatan • Masih kurangnya partisipasi anak dalam perencanaan dan pembangunan (PAPP) • Belum terbentuknya lembaga pemenuhan hak anak ditingkat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif pemenuhan hak anak belum optimal. • Terbatasnya layanan peningkatan kualitas hidup anak di tingkat desa/kecamatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak/ atau Desa/Kecamatan Layak Anak • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui kesepemahaman bersama mengenai pemenuhan hak anak.
4	Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan Dari Kekerasan Termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui UPTD PPA

		<p>perempuan dan jumlah kasus KDRT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan • Tingginya angka perceraian 	<p>perempuan dan anak</p>	
5	Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) • Tingginya tindak kekerasan terhadap anak • Terbatasnya SDM perlindungan Anak yang terlatih • Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimal dan meratanya pembentukan lembaga penyediaan pelayanan pengaduan tingkat desa/kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui UPTD PPA • Adanya lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Mandiri (PATBM) sebagai tempat rujukan pelayanan pengaduan masyarakat

Tabel 3.1.2
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka
berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya
(Pilkada tahun 2024-2026)

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih tingginya tingkat kelahiran penduduk ▪ Rendahnya cakupan peserta Keluarga Berencana MKJP ▪ Tingginya angka drop out ber-Keluarga Berencana ▪ Belum optimalnya kesertaan ber-Keluarga Berencana bagi anggota kelompok Tribina ▪ Masih Lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga ▪ Belum optimalnya keberadaan kelompok-kelompok kegiatan di tingkat Kecamatan ▪ Kurangnya Modal dalam usaha ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana • Terbatasnya personil yang melaksanakan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana • Belum optimalnya pemahaman para pengambil kebijakan untuk mendukung penganggaran program pengendalian 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan capaian akseptor Keluarga Berencana • Adanya pembantuan dan fasilitasi dari lembaga BKB Pusat melalui perwakilan propinsi untuk melaksanakan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana

			penduduk dan keluarga berencana	
2	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive Prevalence Rte</i> (mCPR)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya cakupan peserta Keluarga Berencana MKJP ▪ Rendahnya partisipasi pria dalam ber-Keluarga Berencana 		
3	Menurunnya Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih tingginya angka unmeet need 		
4	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun (ASFR)	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja akan hak-hak reproduksi • Masih rendahnya usia kawin pertama perempuan 		

Tabel 3.1.3
Permasalahan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya Capaian Indeks Pembangunan Gender ▪ Meningkatnya Capaian Indeks Pemberdayaan Gender 	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. • Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO ▪ Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	terhadap perempuan termasuk TPPO	kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		
3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia ▪ Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak ▪ Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Isu strategis yang berkembang dewasa ini akan bertambah banyak dan kompleks, untuk itu perlu dilakukan analisis SWOT dan metode skoring. Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sedangkan metode skoring dengan pembobotan untuk menentukan isu yang mana yang menduduki peringkat teratas dan dianggap penting untuk diprioritaskan.

Analisis SWOT

ANALISIS SWOT	FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN		KELEMAHAN	
		1	Adanya dukungan dana dalam APBD Kab. Bangka	1	Kurang optimal kualitas pelayanan informasi public dan rendahnya evaluasi pelaksanaan program
		2	Motivasi perempuan dalam ber-KB tinggi	2	Rendahnya mutu SDM tenaga lini lapangan, tingginya TFR, dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang

				ber KB
		3	Adanya dukungan dana dalam APBD Kab. Bangka Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan	3 Rendahnya partisipasi dan peran perempuan dalam bidang pembangunan, masih tingginya kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan dan IPG meningkat namun relative rendah di dibandingkan dengan kondisi ideal
		4	adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A	4 Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan
		5	Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak	5 Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dan belum tersedianya data gender dan anak
FAKTOR EKSTERNAL				
PELUANG (O)		STRATEGI (SO)		STRATEGI (SW)
Tingginya animo masyarakat ikut ber KB		1	Meningkatkan penyuluhan, advokasi, pelayanan, dan pembinaan terhadap calon peserta Keluarga Berencana dan peserta Keluarga Berencana aktif	1 Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan professional serta melakukan evaluasi di setiap program
Adanya dukungan dana alokasi khusus (DAK) di bidang KB setiap tahun dari pusat		2	Meningkatkan Pelayanan, Asistensi, Konsultasi Keluarga Berencana melalui penyediaan dana operasional pusat	2 Memberikan pelatihan terhadap SDM tenaga lini lapangan, Meningkatkan penyuluhan, advokasi, pelayanan, dan pembinaan terhadap calon peserta Keluarga Berencana dan peserta Keluarga Berencana, serta melakukan workshop kepada masyarakat tentang pentingnya ber KB.
Adanya payung hukum kesetaraan dan keadilan gender		3	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah melalui koordinasi	3 Melakukan pembinaan organisasi perempuan dan memfasilitasi dan melakukan pendampingan pembentukan pokja PPRG Daerah
Adanya kewenangan		4	Meningkatkan pelayanan KB dan perlindungan	4 Mefaasilitasi dan melakukan

RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

pemerintah daerah di bidang KB dan PA sesuai PP nomor 38 tahun 2017		pemenuhan hak anak melalui peningkatan kapasitas, kuantitas dan sumber daya lembaga penyedia layanan pemenuhan hak-hak anak	<p>pelayanan Kasus tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak</p> <p>mefasilitasi Pembentukan lembaga perlindungan hak perempuan dan melakukan penyusunan data gender</p>
ANCAMAN		STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)
Tingginya angka kelahiran penduduk		1 Mefaasilitasi Pembinaan Kelompok Kampung Keluarga Berencana, melakukan Penyuluhan, Pembinaan dan Pelayanan Akseptor Keluarga Berencana Aktif dan melakukan sosialisasi partisipasi keluarga berencana	1 Meningkatkan peserta keluarga berencana melalui penyuluhan dan pembinaan kampung KB
Rendahnya partisipasi dan peran perempuan dalam bidang pembangunan		2 Melakukan Pembinaan Organisasi Perempuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan	2 Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, & penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll dan tingginya tindakan kekerasan terhadap anak		3 melakukan pendampingan dan melakukan sosialisasi terhadap anak tentang bahayanya penggunaan media social.	3 Fasilitasi dan pelayanan Kasus tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan		4 Melakukan workshop dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4 Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

anak.				
-------	--	--	--	--

Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi	20
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
	Total	100

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis disajikan pada Tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5
Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total Skor x Bobot	Rang- king
		Skor (1- 5)	x bobot 20	Skor (1- 5)	x bobot 20	Skor (1- 5)	x bobot 15	Skor (1- 5)	x bobot 15	Skor (1- 5)	x bobot 30		
1	Tingginya angka kelahiran penduduk	5	100	3	60	3	60	5	100	1	20	340	4
2	Belum optimalnya kesertaan ber-Keluarga Berencana bagi anggota kelompok Tribina	5	100	3	60	3	60	3	60	1	20	300	6
3	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja akan hak-hak reproduksi	5	100	3	60	3	60	3	60	2	40	320	5
4	Tingginya angka usia kawin pertama perempuan	5	100	4	80	4	80	4	60	2	40	380	2
5	Tingginya angka unmeetned	5	100	4	80	4	80	4	80	2	40	400	1
6	Masih terdapatnya persentase angka kegagalan/ber- KB komplikasi	5	100	3	60	4	80	4	60	2	40	360	3
7	Rendahnya partisipasi dan peran perempuan dalam bidang pembangunan	5	100	3	60	3	60	3	60	2	40	320	4
8	Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen	5	100	3	60	3	60	3	60	2	40	320	4
10	Belum semua PD menyusun PPRG	5	100	4	80	4	80	4	60	1	40	360	2
11	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan &	5	100	4	80	4	80	4	60	2	40	380	2

RENSTRA DPPKBPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total Skor x Bobot	Rang- king
		Skor (1- 5)	x bobot 20	Skor (1- 5)	x bobot 20	Skor (1- 5)	x bobot 15	Skor (1- 5)	x bobot 15	Skor (1- 5)	x bobot 30		
	jumlah kasus KDRT.												
12	Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan	3	60	3	60	2	30	3	45	1	30	225	5
13	Tingginya angka perceraian												
14	Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, & penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll.	4	80	5	100	3	60	3	60	2	40	340	3
15	Tingginya tindak kekerasan terhadap anak	4	80	5	100	3	60	3	60	2	40	340	3
16	Rendahnya tingkat kesejahteraan dan perlindungan anak	4	80	5	100	3	60	3	60	2	40	340	3
17	Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk partisipasi masyarakat	4	80	5	100	3	60	3	60	2	40	340	3
18	Belum tersedia data gender dan anak	4	80	5	100	3	60	3	60	2	40	340	3
19	Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.	5	100	5	100	3	60	3	60	4	80	400	1
20	Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak.	3	60	3	60	3	60	3	60	4	80	320	4
21	Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.	5	100	5	100	3	60	3	60	4	80	400	1
22	Belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	3	60	3	60	3	60	3	60	4	80	320	4

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional.
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
4. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll.
5. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
6. Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti dan adanya anak terlantar.

**BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

4.1.a. Tujuan dan Sasaran DP2KBP3A

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut

Tujuan PD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah ***Mewujudkan Keluarga Berkualitas***

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini meliputi :

1. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk;
2. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2024-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran			Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan Keluarga Berkualitas	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	mCPR	%	86	87,05	89,75	91,25	91,25
			Unmeet Need	%	9,00	8,50	8,15	7,85	7,85
			ASFR 15-19 tahun	%	23,29	23,00	22,45	21,95	21,95
		Meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ratio KDRT	Angka	0,17	0,15	0,14	0,13	0,13
			Anugrah Parahiyata Ekapraya (APE)	Opini	Utama	Madya	Madya	Utama	Utama
			Akumulasi Poin Penilaian Kla Yang Terpenuhi	Opini	Nindiya	Nindiya	Nindiya	Nindiya	Nindiya
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi DP2KBP3A	Hasil Evaluasi AKIP DP2KBP3A	Katagori /Nilai	BB	A	A	A	A
			Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	Katagori /Nilai	28,25	28,9	30,15	32,65	32,65
			Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)		11,1	11,86	12,75	13,45	13,45

4.1.b. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

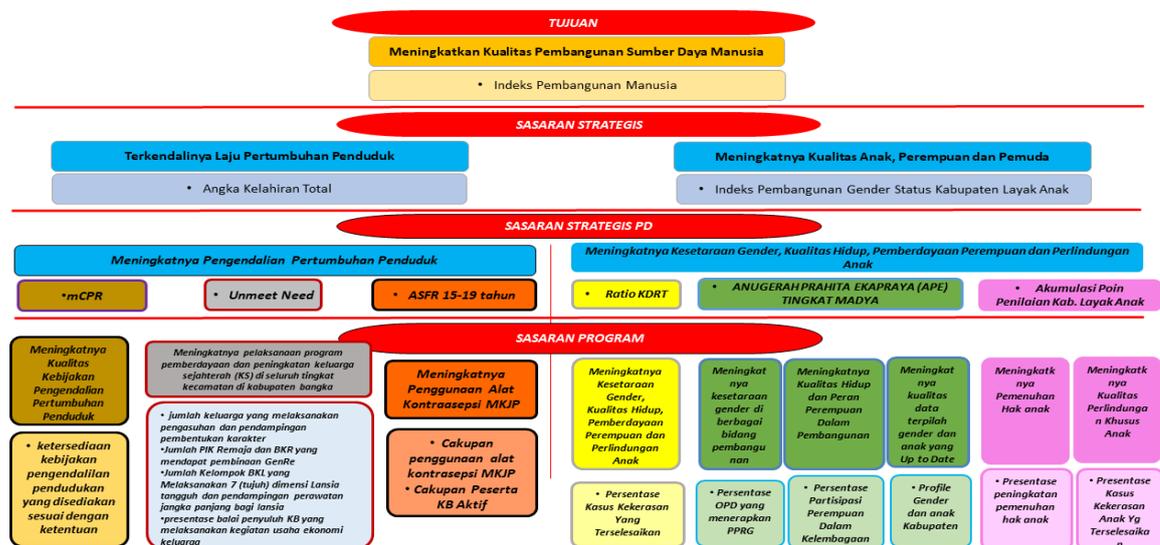
No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Kabupaten/Kota
1	Pengendalian Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk. b. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota.
2	Keluarga Berencana (KB)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk b. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). c. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional. d. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga. e. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota. d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
3	Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Kabupaten/Kota
1	Kualitas Hidup Perempuan	<p>a. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat nasional.</p> <p>b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat nasional.</p> <p>c. Standardisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.</p>	<p>a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.</p>
2	Perlindungan Perempuan	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup nasional.</p> <p>b. Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional.</p> <p>c. Standardisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.</p>	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.</p>
3	Kualitas Keluarga	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat nasional.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat nasional.</p> <p>c. Standardisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak.</p>	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayahkerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.</p>

			d.
4	Sistem Gender dan Anak	<p>a. Penetapan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional.</p> <p>b. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan da</p>	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.
5	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<p>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat nasional.</p>	<p>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.</p>
6	Perlindungan Khusus Anak	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup nasional dan lintas Daerah provinsi.</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat nasional dan lintas Daerah provinsi.</p>	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.</p>

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Tujuan, Sasaran, Outcome, Output serta indikatornya masing-masing)



RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

KBKS - DALDUK

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Kerjasama Pengendalian Penduduk	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi	Meningkatnya Ketersediaan Data Pengendalian Penduduk	Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatnya Penguatan KIE Bangsa Kencana	Meningkatnya Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Meningkatkan pelayanan Pendistribusian dan Penyusunan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Meningkatkan pelayanan KB di Faskes dan Jejaringnya	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kampung KB
--	--	--	--	---	---	---	---	---	--

INDIKATOR KEGIATAN

Persentase Sekolah kependudukan	Persentase data keluarga yang up to date dalam aplikasi SIGA	Persentase keluarga yang didata	Persentase kelompok kegiatan yang dibina untuk meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang ikut serta dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase KIE Bangsa Kencana	Persentase Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Faskes Teregister Pendistribusian Alokasi	Persentase Balai Penyuluh Yang aktif	Persentase faskes dan Jejaring yang terbina	presentase kampung KB yang meningkat statusnya	jumlah kampung kb yang terbentuk
---------------------------------	--	---------------------------------	--	---	-------------------------------	---	--	--------------------------------------	---	--	----------------------------------

PPPA

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Upaya Pencegahan, Penyediaan Lay. Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Meningkatkan Kualitas SDM UPTD PPPA	Meningkatkan Pelayanan Lembaga Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Pemahaman OPD yang responsif Gender	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan	Meningkatkan Keterampilan Satgas PPPA	Meningkatnya Perekonomian Keluarga	Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender & Hak Anak	Meningkatnya Proses Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak & Kualitas Hidup Anak	meningkatnya jumlah lembaga PHA	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Anak	Meningkatnya Upaya Pencegahan, Penyediaan Lay. Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Kualitas Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak
---	-------------------------------------	---	--	--	---------------------------------------	------------------------------------	--	---	---	---------------------------------	--	---	---

INDIKATOR KEGIATAN

Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Yang Aktif	Persentase SDM UPTD PPPA yang terlatih	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Persentase OPD Yang Responsif Gender	Persentase Perempuan Yang Terlibat Dalam Kelembagaan	Jumlah Satgas PPPA Yang Terlatih	Persentase Perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga	Jumlah Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Yang Terbentuk	Persentase Database Gender & Anak Per Lembaga yang up to date	Persentase Lembaga PHA Yang Aktif	Persentase pembentukan Lembaga PHA	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak	Persentase Lembaga Penyedia Perlindungan Khusus Anak Yang Aktif	Jumlah Satgas PPPA Yang Terampil
---	--	--	--------------------------------------	--	----------------------------------	---	---	---	-----------------------------------	------------------------------------	---	---	----------------------------------

KBKS - DALDUK

SASARAN SUB KEGIATAN

Terlaksananya Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Jalar Pendidikan Formal	Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pendataan Keluarga	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
--	---	--	---	--	--	---

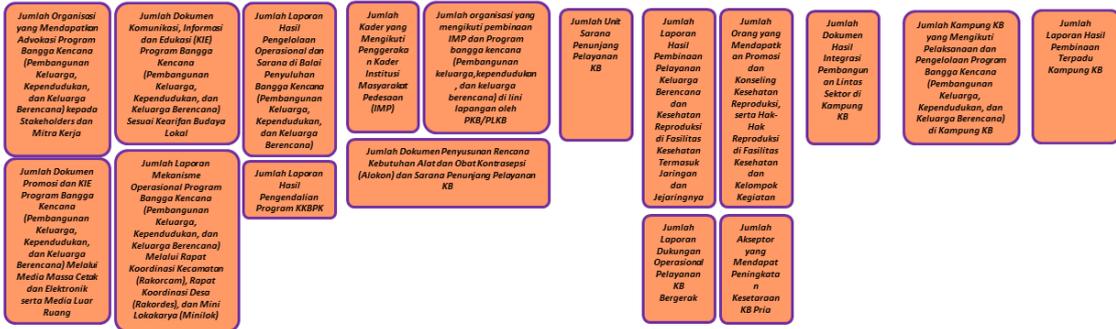
INDIKATOR SUB KEGIATAN

Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Jalar Pendidikan Formal	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan an, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pendataan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Jumlah Kader Pengelola dan Pelatihan (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan dan Pengembangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
---	--	--	--	---	---	--	---	---	---	---	---

SASARAN SUB KEGIATAN



INDIKATOR SUB KEGIATAN

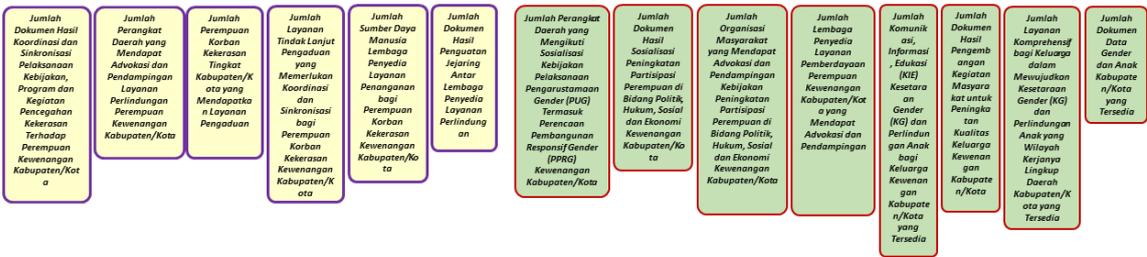


PPPA

SASARAN SUB KEGIATAN



INDIKATOR SUB KEGIATAN



PPPA

SASARAN SUB KEGIATAN



INDIKATOR SUB KEGIATAN



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyuluhan, advokasi, kualitas dan akses pelayanan, serta pembinaan terhadap calon peserta Keluarga Berencana dan peserta Keluarga Berencana aktif
2. Meningkatkan KB Pria
3. Meningkatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD), dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP)
4. Meningkatkan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub-PPKBD.
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemahaman 8 fungsi keluarga melalui kelompok bina ketahanan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia)
6. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas lembaga-lembaga Pusat Informasi Konseling Remaja baik di jalur formal ataupun non formal
7. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kelompok-Kelompok UPPKS
8. Meningkatkan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan
9. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah melalui koordinasi
10. Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui peningkatan kapasitas, kuantitas dan sumber daya lembaga penyedia layanan pemenuhan hak-hak anak
11. Penyusunan instrument data gender melalui koordinasi dan konsolidasi Perangkat Daerah serta kegiatan forum Data
12. Meningkatkan pelayanan bantuan perlindungan anak korban kekerasan melalui penyediaan Dana Operasional Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
13. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
14. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan.

5.2 Kebijakan Perangkat Daerah

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penyuluhan, advokasi, pelayanan, dan pembinaan dengan fokus Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE)
2. Penguatan kemitraan dalam rangka peningkatan KB Pria
3. Penguatan kapabilitas dan kemitraan fasilitas kesehatan dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR
4. Peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi informasi
5. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Bina Ketahanan Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia)
6. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas lembaga-lembaga Pusat Informasi Konseling Remaja dengan fokus pembentukan dan pembinaan lembaga pusat konseling
7. Peningkatan Kualitas kelompok-kelompok UPPKS dengan fokus pembekalan dan pelatihan keterampilan.
8. Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk
9. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG dengan fokus Anggaran berbasis PPRG
10. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pembentukan Kabupaten Layak Anak
11. Penyelesaian penyusunan Data Gender dengan fokus pada koordinasi dan konsolidasi Perangkat Daerah
12. Peningkatan cakupan layanan anak korban tindak kekerasan dengan fokus pada pengembangan kapasitas pusat layanan korban tindak kekerasan perempuan dan anak
13. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang dengan fokus pada pengembangan kapasitas dan sumber daya
14. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada perempuan disabilitas, korban kekerasan, kelompok rentan dan kepala keluarga perempuan miskin.

Untuk lebih jelasnya, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel TC.26 di bawah ini.

Tabel TC. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1 Mewujudkan Keluarga Berkualitas	1.1 Menurunnya Angka Kelahiran	1.1.1. Meningkatkan penyuluhan, advokasi, kualitas dan akses pelayanan, serta pembinaan terhadap calon peserta Keluarga Berencana dan peserta Keluarga Berencana aktif	1.1.1.1. Peningkatan penyuluhan, advokasi, pelayanan, dan pembinaan dengan fokus Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE)
		1.1.2 Meningkatkan KB Pria	1.1.1.2 Peningkatan kemitraan dalam rangka peningkatan KB Pria
		1.1.3 Meningkatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD), dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP)	1.1.1.3 Penguatan kapabilitas dan kemitraan fasilitas kesehatan dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR
		1.1.4 Meningkatkan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub-PPKBD	1.1.1.4 Peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi informasi
		1.1.5 Meningkatkan dan mengoptimalkan pemahaman 8 fungsi keluarga melalui kelompok bina ketahanan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia)	1.1.1.5 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Bina Ketahanan Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia)
		1.1.6 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas lembaga-lembaga Pusat Informasi Konseling Remaja baik di jalur formal ataupun non formal	1.1.1.6 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas lembaga-lembaga Pusat Informasi Konseling Remaja dengan fokus pembentukan dan pembinaan lembaga pusat konseling
		1.1.7 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kelompok-kelompok UPPKS	1.1.1.7 Peningkatan Kualitas kelompok-kelompok UPPKS dengan fokus pembekalan dan pelatihan keterampilan
			1.1.8 Meningkatkan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan

RENSTRA DPPKBPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	1.2 Meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	2.1.1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah melalui koordinasi	2.1.1.1. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG dengan fokus Anggaran berbasis PPRG
		2.1.2. Penyusunan instrumen data gender melalui koordinasi dan konsolidasi Perangkat Daerah serta kegiatan forum Data	2.1.2.1. Penyelesaian penyusunan Data Gender dengan fokus pada koordinasi dan konsolidasi Perangkat Daerah
		2.2.1. Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui peningkatan kapasitas, kuantitas dan sumber daya lembaga penyedia layanan pemenuhan hak-hak anak	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pembentukan Kabupaten Layak Anak
		2.2.2. Meningkatkan pelayanan bantuan perlindungan anak korban kekerasan melalui penyediaan Dana Operasional Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	2.2.2.1. Peningkatan cakupan layanan anak korban tindak kekerasan dengan fokus pada pengembangan kapasitas pusat layanan korban tindak kekerasan perempuan dan anak
		3.1.1. Meningkatkan Asistensi, Konsultasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	3.1.1.1. Melakukan konsolidasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program PD merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per PD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD, selanjutnya dijabarkan PD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan PD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mendukung tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2024-2026 adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Keegiatannya Meliputi :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Keegiatannya Meliputi :

- a. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Keegiatannya Meliputi :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
 - 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub Keempatannya Meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
 - 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Sub Keempatannya Meliputi :
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
 - d. Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
 - 6. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Sub Keempatannya Meliputi :
 - a. Penyediaan Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 7. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya**
Sub Keempatannya Meliputi :
 - a. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
- B. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**
- 1. Kegiatan Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**
Sub Keempatannya Meliputi :
 - a. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal

- b. Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan

2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Keegiatannya Meliputi :

- a. Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga
- b. Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK Di Sektor Lain
- c. Penyediaan Data Dan Informasi Keluarga
- d. Pencatatan Dan Pengumpulan Data Keluarga
- e. Pengolahan Dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan Dan Pelayanan KB
- f. Pembinaan Dan Pengawasan Pencatatan Dan Pelaporan Program KKBPK

C. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Lokal

Sub Keegiatannya Meliputi :

- a. Advokasi Program KKBPK Kepada *Stakeholders* Dan Mitra Kerja
- b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
- c. Promosi Dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak Dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
- d. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
- e. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
- f. Pengendalian Program KKBPK

2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Sub Keegiatannya Meliputi :

- a. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
- b. Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- c. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

3. Kegiatan Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Keegiatannya Meliputi :

- a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- c. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
- d. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
- e. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya.
- f. Promosi Dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan Dan Kelompok Kegiatan
- g. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
- h. Peningkatan Kesertaan KB Pria

4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Sub Keegiatannya Meliputi :

- a. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
- b. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
- c. Pembinaan Terpadu Kampung KB

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatannya Meliputi :

- a. Pembentukan Kelompok Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi Dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
- b. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (KB, BKR, BKL, PIK-R, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- c. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- d. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- e. Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)
- f. Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- g. Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

2. Kegiatan Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Keempatannya Meliputi :

- a. Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra Dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

E. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Keempatannya Meliputi :

- a. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pug Termasuk PPRG

2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Keempatannya Meliputi :

- a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi
- b. Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi

3. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Keempatannya Meliputi :

- a. Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

F. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Keempatannya Meliputi :

- a. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program Dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- b. Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**
Sub Keempatannya meliputi :
 - a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Keempatannya Meliputi :
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

G. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

- 1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Keempatannya Meliputi :
 - a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi KG Dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2. Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG Dan Hak Anak Ang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Keempatannya Meliputi :

1. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Perlindungan Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

H. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Keegiatannya Meliputi :

1. Penyediaan Data Gender Dan Anak Di Kewenangan Kabupaten/Kota

I. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

1. Kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Keegiatannya Meliputi :

- a. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Keegiatannya Meliputi :

- a. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

J. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Keegiatannya Meliputi :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Keegiatannya Meliputi :

- a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Keegiatannya Meliputi :

- a. Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Koordinasi Dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan rincian program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2024-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
MEWUJUDKAN KELUARGA YANG BERKUALITAS				Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga)	56,03	60		62,59		67,75		67,75		DINP2KB P3A	I-Bangga yang dikeluarkan BKKBN	
Sasaran Strategis 1	MENINGKATNYA PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK			mCPR	73,42	78,15	2.704.871.016,00	78,95	2.776.085.296,56	79,8	2.901.796.973,87	79,8	8.382.753.286,42		Jumlah peserta KB Aktif Modern / jumlah Pasangan Usia Subur x 100%	
				ASFR 15-19	23,29	23		22,45		21,95		21,95			Jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur 15-19 th / Jumlah penduduk wanita umur 15-19 tahun x 1000	
				Unmeet Need	16,68	8,5		8,15		7,85		7,85			Jumlah PUS tak KB (ingin anak di tunda dan tidak ingin anak lagi) / jumlah PUS x 100%	
Sasaran Program 1	Meningkatnya Penggunaan Alat Kontraasepsi MKJP	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	cakupan penggunaan alat kontrasepsi MKJP	12,81	14,45	1.066.800.000,00	14,85	1.090.589.640,00	15,15	1.132.250.164,25	15,15	3.289.639.804,25	Kabid Pembinaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Jumlah Peserta KB MKJP / Jumlah Peserta KB x 100%	
				Cakupan Peserta KB Aktif	72,12	73,92		74,15		75,1		75,1			Jumlah Peserta KB aktif / Jumlah PUS x 100 %	

RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Meningkatnya Penguatan KIE Bangsa Kencana	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Presentase Penguatan KIE Bangsa Kencana	100	100	262.250.000,00	100	268.098.175,00	100	278.339.525,29	100	808.687.700,29		Jumlah penggunaan KIE bangsa kencana di bagi Jumlah KIE Bangsa Kencana x 100%	
		2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	15 Organisasi (PIK-R)	20 Organisasi (PIK-R)	37.250.000,00	25 Organisasi (PIK-R)	38.080.675,00	32 Organisasi (PIK-R)	39.535.356,79	32 Organisasi (PIK-R)	114.866.031,79		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja pada tahun berkenan	
	Terlaksananya Program Bangsa Kencana	2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4 Dokumen (KIE KKBPK)	4 Dokumen (KIE KKBPK)	40.000.000,00	4 Dokumen (KIE KKBPK)	40.892.000,00	4 Dokumen (KIE KKBPK)	42.454.074,40	12 Dokumen (KIE KKBPK)	123.346.074,40		Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal pada tahun berkenan	

RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		2.14.03.2.0 1.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	6 Dokumen (KIE Pemutaran film keliling)	6 Dokumen (KIE Pemutaran film keliling)	25.000.000,00	6 Dokumen (KIE Pemutaran film keliling)	25.557.500,00	6 Dokumen (KIE Pemutaran film keliling)	26.533.796,50	18 Dokumen (KIE Pemutaran film keliling)	77.091.296,50		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang pada tahun berkenan	
		2.14.03.2.0 1.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	12 Laporan	51.115.000,00	12 Laporan	53.067.593,00	36 Laporan	154.182.593,00		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) pada tahun berkenan	

RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2.14.03.2.0 1.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPB	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	12 Laporan	81.784.000,00	12 Laporan	84.908.148,80	36 Laporan	246.692.148,80			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) pada tahun berkenan
		2.14.03.2.0 1.08	Pengendalian Program KKBPB	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPB	2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	2 Laporan	30.669.000,00	2 Laporan	31.840.555,80	6 Laporan	92.509.555,80			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPB pada tahun berkenan
	Meningkatnya Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.14.03.2.0 2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Presentase Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	17,28	18,51	220.000.000,00	19,25	224.906.000,00	20	233.497.409,20	20	678.403.409,20			jumlah kader yang mengikuti penggerakan IMP dibagi total jumlah kader x 100%
	Tertlaksanya Penggerakan IMP	2.14.03.2.0 2.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan Program bangga kencana (Pembangunan keluarga,kependudukan, dan keluarga berencana) di lini lapangan oleh PKB/PLKB		10 Organisasi	45.000.000,00	15 Organisasi	46.003.500,00	20 Organisasi	47.760.833,70	20 Organisasi	138.764.333,70			Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan Program bangga kencana pada tahun berkenan

RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2.14.03.2.0 2.03	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah laporan hasil penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program Bangsa Kencana (pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan keluarga berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		8 Laporan	125.000.000,00	8 Laporan	127.787.500,00	8 Laporan	132.668.982,50	24 Laporan	385.456.482,50		Jumlah laporan hasil penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program Bangsa Kencana (pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan keluarga berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) pada tahun berkenan	
		2.14.03.2.0 2.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	413 Orang	413 Orang	50.000.000,00	413 Orang	51.115.000,00	413 Orang	53.067.593,00	413 Orang	154.182.593,00		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) pada tahun berkenan	
	Meningkatkan pelayanan Pendistribusian dan Penyusunan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	2.14.03.2.0 3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes Teregister Pendistribusian Alokasi	100%	100%	409.550.000,00	100%	418.682.965,00	100%	434.676.654,26	100%	1.262.909.619,26		jumlah alat dan obat kontrasepsi yang di distribusikan ke faskes dibagi total jumlah faskes x 100%	

RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		2.14.03.2.0 3.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17 Laporan	17 Laporan 28.500.000,00	17 Laporan	29.135.550,00	17 Laporan	30.248.528,01	51 Laporan	87.884.078,01			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya pada tahun berkenan	
	Terlaksananya Pendistribusian dan Pelaporan Kebutuhan Alat Kontrasepsi	2.14.03.2.0 3.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	543 Orang (33 Akseptor MOW, 106 Akseptor IUD, 381 Implant, 23 Cabut Implant)	546 Orang (33 Akseptor MOW, 3 Akseptor MOP, 106 Akseptor IUD, 381 akseptor Implant, 23 akseptor Cabut Implant)	553 Orang (38 Aksept or MOW, 5 Aksept or MOP, 106 Aksept or IUD, 381 aksept or Implant, 23 aksept or Cabut Implant)	102.230.000,00	572 Orang (38 Akseptor MOW, 5 Akseptor MOP, 116 Akseptor IUD, 360 akseptor Implant, 23 akseptor Cabut Implant)	106.135.186,00	572 Orang (38 Akseptor MOW, 5 Akseptor MOP, 116 Akseptor IUD, 360 akseptor Implant)	308.365.186,00			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun berkenan	
		2.14.03.2.0 3.06	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB pada tahun berkenan	1 Dokumen (buku kebutuhan Alakon)	1 Dokumen (buku kebutuhan Alakon)	1 Dokumen (buku kebutuhan Alakon)	5.250.000,00	5.367.075,00	1 Dokumen (buku kebutuhan Alakon)	5.572.097,27	3 Dokumen (buku kebutuhan Alakon)	16.189.172,27			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB

RENSTRA DPPKBPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Tersedianya Kelengkapan Balai Penyuluh KB	2.14.03.2.0 3.06	Penyediaan Sarana Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	8 Unit (Balai penyuluh KB)	8 Unit (Balai penyuluh KB)	100.000.000,00	8 Unit (Balai penyuluh KB)	102.230.000,00	8 Unit (Balai penyuluh KB)	106.135.186,00	8 Unit (Balai penyuluh KB)	308.365.186,00			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang di adakan pada tahun berkenan
	Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan KB dan Reproduksi di Faskes dan Jejaringnya	2.14.03.2.0 3.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9 Laporan	9 Laporan	26.250.000,00	9 Laporan	26.835.375,00	9 Laporan	27.860.486,33	27 Laporan	80.945.861,33			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya pada tahun berkenan
		2.14.03.2.0 3.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	13 Orang	13 Orang	22.050.000,00	13 Orang	22.541.715,00	13 Orang	23.402.808,51	39 Orang	67.994.523,51			Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan pada tahun berkenan
		2.14.03.2.0 3.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	1 Laporan	76.672.500,00	1 Laporan	79.601.389,50	3 Laporan	231.273.889,50			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak pada tahun berkenan
		2.14.03.2.0 3.13	Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	15 Orang	15 Orang	52.500.000,00	15 Orang	53.670.750,00	15 Orang	55.720.972,65	45 Orang	161.891.722,65			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria pada tahun berkenan

RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	meningkatnya status kampung KB	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	presentase kampung KB yang meningkat statusnya	5%	10%	175.000.000,00	100%	178.902.500,00	100%	185.736.575,50	100%	539.639.075,50		Jumlah kampung kb yang statusnya meningkat di bagi total kampung kb x 100%	
	meningkatnya jumlah kampung KB			jumlah kampung kb yang terbentuk	21	23		24		25					jumlah kampung kb yang sudah terbentuk ditambah jumlah kampung kb baru	
		2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen (intervensi lintas sektor di kampung KB)	1 Dokumen (intervensi lintas sektor di kampung KB)	50.000.000,00	1 Dokumen (intervensi lintas sektor di kampung KB)	51.115.000,00	1 Dokumen (intervensi lintas sektor di kampung KB)	53.067.593,00	3 Dokumen (intervensi lintas sektor di kampung KB)	154.182.593,00		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB pada tahun berkenan	
		2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	17 Kampung KB	17 Kampung KB	75.000.000,00	17 Kampung KB	76.672.500,00	17 Kampung KB	79.601.389,50	17 Kampung KB	231.273.889,50		Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB pada tahun berkenan	

RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2.14.03.2.0 4.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan (kampung KB yang dibina)	1 Laporan (kampung KB yang dibina)	50.000.000,00	1 Laporan (kampung KB yang dibina)	51.115.000,00	1 Laporan (kampung KB yang dibina)	53.067.593,00	3 Laporan (kampung KB yang dibina)	154.182.593,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB pada tahun berkenan	
Sasaran Program 2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	ketersediaan kebijakan pengendalian pendudukan yang disediakan sesuai dengan ketentuan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	725.260.766,00	1 Kebijakan	752.329.737,98	1 Kebijakan	795.019.295,95	3 Kebijakan	2.272.609.799,93	Kabid Pengendalian Penduduk	Jumlah kebijakan pengendalian penduduk sesuai dengan ketentuan	
	Meningkatnya Kerjasama Pengendalian Penduduk	2.14.02.2.0 1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan	11	12	99.612.500,00	13	101.833.858,75	14	105.723.912,15	14	307.170.270,90		jumlah sekolah yang melaksanakan kegiatan pendidikan siaga kependudukan (SLTP-SLTA)	
	Terlaksananya Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	2.14.02.2.0 1.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	5 Dokumen (MOU dengan Sekolah)	5 Dokumen (MOU dengan Sekolah)	50.000.000,00	10 Dokumen (MOU dengan Sekolah)	51.115.000,00	15 Dokumen (MOU dengan Sekolah)	53.067.593,00	30 Dokumen (MOU dengan Sekolah)	154.182.593,00		Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal pada tahun berkenan ditambah jumlah dokumen (MOU) pada tahun sebelumnya	

RENSTRA DPPKBPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	<i>Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan</i>	2.14.02.2.0 1.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	<i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan</i>	15 Organisasi	15 Organisasi 49.612.500,00	15 Organisasi	50.718.858,75	15 Organisasi	52.656.319,15	15 Organisasi	152.987.677,90			<i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan pada tahun berkenan</i>	
	<i>Meningkatnya Ketersediaan Data Pengendalian Penduduk</i>	2.14.02.2.0 2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase keluarga yang didata</i>	100	100 625.648.266,00	100,0 0%	650.495.879,23	100,00%	689.295.383,80	100,00%	1.965.439.529,03			<i>jumlah keluarga dibagi jumlah penduduk x 100%</i>	
	<i>Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Keluarga</i>			<i>Persentase Data Keluarga Yg Uptodate dalam Aplikasi SIGA</i>	100	100	100,0 0%		100,00%						<i>Jumlah Keluarga yang di data dibagi jumlah keluarga x 100%</i>	
	<i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga</i>	2.14.02.2.0 2.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	<i>Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</i>	1 Dokumen (buku proyeksi kependudukan)	1 Dokumen (buku proyeksi kependudukan)	11.025.000,00	1 Dokumen (buku proyeksi kependudukan)	11.270.857,50	1 Dokumen (buku proyeksi kependudukan)	25.651.966,24	3 Dokumen (buku proyeksi kependudukan)	47.947.823,74		<i>Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada tahun berkenan</i>	

RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		2.14.02.2.0 2.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	4 Unit (rumah data)	6 Unit (rumah data) 22.050.000,00	8 Unit (rumah data)	22.541.715,00	10 Unit (rumah data)	23.402.808,51	24 Unit (rumah data)	67.994.523,51			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk ditambah jumlah rumah data yang telah terbentuk	
	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	2.14.02.2.0 2.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen (buku data mikro keluarga)	16.035.766,00	1 Dokumen (buku data mikro keluarga)	27.289.020,48	1 Dokumen (buku data mikro keluarga)	28.331.461,06	3 Dokumen (buku data mikro keluarga)	71.656.247,55			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya pada tahun berkenan	
	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2.14.02.2.0 2.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	10 Laporan (buku pendataan keluarga)	500.000.000,00	10 Laporan (buku pendataan keluarga)	511.150.000,00	10 Laporan (buku pendataan keluarga)	530.675.930,00	30 Laporan (buku pendataan keluarga)	1.541.825.930,00			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga pada tahun berkenan	
		2.14.02.2.0 2.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	3 Dokumen (laporan dallap dan PELKON KB)	60.000.000,00	3 Dokumen (laporan dallap dan PELKON KB)	61.338.000,00	3 Dokumen (laporan dallap dan PELKON KB)	63.681.111,60	9 Dokumen (laporan dallap dan PELKON KB)	185.019.111,60			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB pada tahun berkenan	
	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2.14.02.2.0 2.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	2 Laporan	16.537.500,00	2 Laporan	16.906.286,25	2 Laporan	17.552.106,38	6 Laporan	50.995.892,63			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada tahun berkenan	

RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Sasaran Program 3	Meningkatnya pelaksanaan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) di seluruh tingkat kecamatan di kabupaten bangka	2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	82	123	912.810.250,00	150	933.165.918,58	164	974.527.513,66	164	2.820.503.682,24	Pembinaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Jumlah keluarga anggota BKB hadir pertemuan BKB, mendapat materi menjadi orang tua hebat dan menggunakan Kartu kembang anak (KKA)	
				Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	54	56		58		60		60	Pembinaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	jumlah PIK R yang mendapatkan pembinaan yang di tunjukan dengan cakupan laporan kegiatan PIK R pada aplikasi SIGA (R/1/PIK R)		
				Jumlah Kelompok BKL yang Melaksanakan 7 (tujuh) dimensi Lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia	24	26		28		30		30	Pembinaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Jumlah kelompok BKL yang melaporkan pelaksanaan kegiatan tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang		
				presentase balai penyuluh KB yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	100	100		100		100		100	Pembinaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	jumlah balai penyuluh kb yang melaporkan melalui SIGA (formulir R1UPPKA) di bagi Jumlah balai penyuluh KB X 100%		

RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<i>Meningkanya Peran Masyarakat dalam Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>2.14.04.2.01</i>	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Persentase kelompok kegiatan yang dibina untuk meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>24,69</i>	<i>34,57</i>	<i>862.810.250,00</i>	<i>44,44</i>	<i>882.050.918,58</i>	<i>54,32</i>	<i>915.745.263,66</i>	<i>100.00%</i>	<i>2.660.606.432,24</i>			<i>jumlah kelompok kegiatan yang dibina di bagi jumlah kelompok kegiatan yang dibentuk x 100%</i>
	<i>Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	<i>2.14.04.2.01.01</i>	<i>Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)</i>	<i>Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk</i>	<i>12 Kelompok</i>	<i>12 Kelompok</i>	<i>65.000.000,00</i>	<i>12 Kelompok</i>	<i>66.449.500,00</i>	<i>12 Kelompok</i>	<i>68.987.870,90</i>	<i>12 Kelompok</i>	<i>200.437.370,90</i>			<i>Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk ditambah Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang telah terbentuk</i>

RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2.14.04.2.0 1.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	13 Unit	13 Unit	90.000.000,00	13 Unit	92.007.000,00	13 Unit	95.521.667,40	39 Unit	277.528.667,40		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) ditambah Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang sudah ada	
		2.14.04.2.0 1.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	44.100.000,00	1 Laporan	45.083.430,00	1 Laporan	46.805.617,03	3 Laporan	135.989.047,03		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) pada tahun berkenan	
		2.14.04.2.0 1.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	60 Orang	60 Orang	33.710.250,00	60 Orang	34.461.988,58	60 Orang	35.778.436,54	60 Orang	103.950.675,11		Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	

RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		2.14.04.2.0 1.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKL, PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	687 Orang	687 Orang	400.000.000,00	687 Orang	408.920.000,00	687 Orang	424.540.744,00	687 Orang	1.233.460.744,00		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) pada tahun berkenan	
		2.14.04.2.0 1.06	Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	127 Kelompok	147 Kelompok	30.000.000,00	167 Kelompok	30.669.000,00	187 Kelompok	31.840.555,80	187 Kelompok	92.509.555,80		Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS) pada tahun berkenan	
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	51.115.000,00	1 Laporan	53.067.593,00	3 Laporan	154.182.593,00		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) pada tahun berkenan	

RENSTRA DPPKBPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		2.14.04.2.0 1.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	153.345.000,00	1 Laporan	159.202.779,00	3 Laporan	462.547.779,00		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) pada tahun berkenan	
	Meningkatnya peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	2.14.04.2.0 2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang ikut serta dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100%	100%	50.000.000,00	100%	51.115.000,00	100%	58.782.250,00	100%	159.897.250,00		jumlah organisasi yang mengikuti program ketahanan dan kesejahteraan keluarga di bagi jumlah organisasi masyarakat x 100%	

RENSTRA DPPKBPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Terlaksananya Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.0 2.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Organisasi	10 Organisasi	50.000.000,00	10 Organisasi	51.115.000,00	10 Organisasi	58.782.250,00	10 Organisasi	159.897.250,00			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) pada tahun berkenan
Mewujudkan Keluarga Berkualitas				Persentase Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak												Jumlah PD Yg Responsif Gender dibagi jumlah PD x 100%
Sasaran Statgis 2	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Ratio KDRT	0,17	0,15	622.750.000,00	0,14	636.637.325,00	0,13	660.956.870,82	0,13	1.920.344.195,82			Jumlah KDRT / Jumlah Rumah Tangga x 100%
Sasaran Program 1	Meningkatnya Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Yang terselesaikan	100	100	622.750.000,00	100	636.637.325,00	100	660.956.870,82	100	1.920.344.195,82	Kabid Pemberdayaan Perempuan		Jumlah Kasus Kekerasan Yang Terlayani dibagi Jumlah Kasus x 100%

RENSTRA DPPKBPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Meningkatnya Upaya Pencegahan, Penyediaan Lay. Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Lay. Perlindungan Perempuan	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Yang Aktif	100.00%	100.00%	150.000.000,00	100.00%	153.345.000,00	100.00%	159.202.779,00	100.00%	462.547.779,00		jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif di bagi jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan x 100%	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Dokumen (Sosialisasi KTP)	75.000.000,00	13 Dokumen (Sosialisasi KTP)	76.672.500,00	13 Dokumen (Sosialisasi KTP)	79.601.389,50	39 Dokumen (Sosialisasi KTP)	231.273.889,50		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berkenan		
	Terlaksananya Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan kepada Perangkat Daerah	2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	75.000.000,00	3 Perangkat Daerah	76.672.500,00	3 Perangkat Daerah	79.601.389,50	9 Perangkat Daerah	231.273.889,50		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berkenan		

RENSTRA DPPKBPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Meningkatkan Kualitas SDM UPTD PPPA	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SDM UPTD PPPA yang terlatih	16%	32%	252.250.000,00	64%	257.875.175,00	100%	267.726.006,69	100%	777.851.181,69			jumlah SDM UPTD PPPA yang mengikuti pelatihan dibagi jumlah SDM UPTD PPPA x 100%
	Terlaksananya Layanan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	30 orang	30 orang	152.250.000,00	30 orang	155.645.175,00	30 orang	161.590.820,69	90 orang	469.485.995,69			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan pada tahun berkenan
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Layanan (korban Perempuan)	30 Layanan (korban Perempuan)	100.000.000,00	30 Layanan (korban Perempuan)	102.230.000,00	30 Layanan (korban Perempuan)	106.135.186,00	90 Layanan (korban Perempuan)	308.365.186,00			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berkenan
	Meningkatkan Pelayanan Lembaga Perlindungan Perempuan	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	100%	100%	220.500.000,00	100%	225.417.150,00	100%	234.028.085,13	100%	679.945.235,13			jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif di bagi jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan x 100%

RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<i>Terlaksananya Bimtek Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan</i>	2.08.03.2.0 3.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>50 Orang</i>	<i>50 Orang</i>	<i>177.000.000,00</i>	<i>50 Orang</i>	<i>180.947.100,00</i>	<i>50 Orang</i>	<i>187.859.279,22</i>	<i>50 Orang</i>	<i>545.806.379,22</i>		<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berkenan</i>	
	<i>Terlaksannya MoU Kerjasama</i>	2.08.03.2.0 3.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan</i>	<i>5 dokumen</i>	<i>5 dokumen</i>	<i>43.500.000,00</i>	<i>5 dokumen</i>	<i>44.470.050,00</i>	<i>5 dokumen</i>	<i>46.168.805,91</i>	<i>15 dokumen</i>	<i>134.138.855,91</i>		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan pada tahun berkenan</i>	
Sasaran Statigis 2				ANUGERAH PRAHITA EKAPRAYA (APE)	Maadya	Madya	690.083.263,00	Utama	705.472.119,76	Utama	732.421.154,74	Utama	2.127.976.537,50		Penghargaan Yang di dapat Dari Kementerian PPPA apabila Terpenuhi Semua Kriteria Penilaian	
Sasaran Program 2	<i>Meningkatnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan</i>	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	<i>Persentase PD yang menerapkan PPRG</i>	<i>79.11</i>	<i>100</i>	<i>350.125.000,00</i>	<i>100</i>	<i>357.932.787,50</i>	<i>100</i>	<i>371.605.819,98</i>	<i>100</i>	<i>1.079.663.607,48</i>	Kabid Pemberdayaan Perempuan	<i>Jumlah PD yang menerapkan PPRG dibagi Jumlah seluruh PD x 100%</i>	
	<i>Meningkatnya Pemahaman PD yang responsif Gender</i>	2.08.02.2.0 1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase PD Yang Responsif Gender</i>	<i>89</i>	<i>95</i>	<i>100.000.000,00</i>	<i>100</i>	<i>102.230.000,00</i>	<i>100</i>	<i>106.135.186,00</i>	<i>100</i>	<i>308.365.186,00</i>		<i>Jumlah PD yang responsif gender dibagi jumlah PD x 100%</i>	

RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<i>Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)</i>	2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	100.000.000,00	34 Perangkat Daerah	102.230.000,00	34 Perangkat Daerah	106.135.186,00	34 Perangkat Daerah	308.365.186,00			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berkenan</i>
	<i>Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan</i>	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat dan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Perempuan Yang Terlibat Dalam Kelembagaan</i>	35,15	37,95	167.050.000,00	40,15	170.775.215,00	45,55	177.298.828,21	45,55	515.124.043,21			<i>Jumlah Perempuan yang terlibat dalam kelembagaan dibagi Jumlah keseluruhan perempuan x 100%</i>
	<i>Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	15 Dokumen (organisasi wanita yang di bina)	15 Dokumen (organisasi wanita yang di bina)	95.000.000,00	15 Dokumen (organisasi wanita yang di bina)	97.118.500,00	15 Dokumen (organisasi wanita yang di bina)	100.828.426,70	45 Dokumen (organisasi wanita yang di bina)	292.946.926,70			<i>Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berkenan</i>

RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<i>Terlaksananya Pendampingan Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>	2.08.02.2.0 2.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	<i>Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	15 Organisasi (kelompok masyarakat yg dibina)	15 Organisasi (kelompok masyarakat yg dibina)	72.050.000,00	15 Organisasi (kelompok masyarakat yg dibina)	73.656.715,00	15 Organisasi (kelompok masyarakat yg dibina)	76.470.401,51	15 Organisasi (kelompok masyarakat yg dibina)	222.177.116,51			<i>Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berkenan</i>
	<i>Meningkatkan Keterampilan Satgas PPPA</i>	2.08.02.2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Satgas PPPA Yang Terlatih</i>	30 orang	30 orang	83.075.000,00	50 Orang	84.927.572,50	81 Orang	88.171.805,77		256.174.378,27			<i>Jumlah Satgas PPPA Yang Terlatih dibagi Jumlah Satgas PPPA x 100%</i>
	<i>Terlaksananya Advokasi dan Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan</i>		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan</i>	15 Lembaga (Forum Puspa)	15 Lembaga (Forum Puspa)	83.075.000,00	15 Lembaga (Forum Puspa)	84.927.572,50	15 Lembaga (Forum Puspa)	88.171.805,77	15 Lembaga (Forum Puspa)	256.174.378,27			<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan pada tahun berkenan</i>
<i>Sasaran Program 3</i>	<i>Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan</i>	2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	<i>Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan</i>	36,43	37,9	283.208.263,00	38,65	289.523.807,26	40,15	300.583.616,70	40,15	873.315.686,97	<i>Kabid Pemberdayaan Perempuan</i>		<i>Jumlah perempuan yg berpartisipasi di kelembagaan dibagi Jumlah perempuan x 100%</i>

RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Meningkatnya Perekonomian Keluarga	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga	15,75	15,75	193.325.000,00	16,25	197.636.147,50	16,85	205.185.848,33	16,85	596.146.995,83		Jumlah perempuan yang bekerja dibagi Jumlah perempuan x 100%	
	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui KIE	2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	8 Dokumen (konseling)	8 Dokumen (konseling)	83.075.000,00	8 Dokumen (konseling)	84.927.572,50	8 Dokumen (konseling)	88.171.805,77	24 Dokumen (konseling)	256.174.378,27		Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia pada tahun berkenan	
		2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen (industri rumahan yang aktif)	50 Dokumen (industri rumahan yang aktif)	110.250.000,00	50 Dokumen (industri rumahan yang aktif)	112.708.575,00	50 Dokumen (industri rumahan yang aktif)	117.014.042,57	150 Dokumen (industri rumahan yang aktif)	339.972.617,57		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berkenan	
	Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender & Hak Anak	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Yang Terbentuk	2 Kelompok	2 Kelompok	89.883.263,00	2 Kelompok	91.887.659,76	2 Kelompok	95.397.768,37	2 Kelompok	277.168.691,13		Jumlah Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) ditambah Jumlah Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang baru di bentuk	

RENSTRA DPPKBPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<i>Terlaksananya Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak</i>	2.08.04.2.0 3.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	10 Layanan	10 Layanan	89.883.263,00	10 Layanan	91.887.659,76	10 Layanan	95.397.768,37	30 Layanan	277.168.691,13			<i>Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia pada tahun berkenan</i>
Sasaran Program 4	Meningkatnya kualitas data terpilah gender dan anak yang Up to Date	2.08.05.2.0 1	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Profile Gender dan anak Kabupaten	1	1	56.750.000,00	1	58.015.525,00	1	60.231.718,06	3	174.997.243,06	Kabid Perlindungan Anak		jumlah buku Profile Gender dan anak Kabupaten
	Meningkatnya Proses Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	2.08.05.2.0 1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Database Gender & Anak Per Lembaga yang up to date	100	100	56.750.000,00	100	58.015.525,00	100	60.231.718,06	100	174.997.243,06			jumlah buku Persentase Database Gender & Anak Per Lembaga yang di update dibagi jumlah buku Persentase Database Gender & Anak Per Lembaga x 100%
	<i>Terlaksananya Penyusunan Data Gender dan Anak</i>	2.08.05.2.0 1.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	1 Dokumen (buku profil gender dan anak)	1 Dokumen (buku profil gender dan anak)	56.750.000,00	1 Dokumen (buku profil gender dan anak)	58.015.525,00	1 Dokumen (buku profil gender dan anak)	60.231.718,06	3 Dokumen (buku profil gender dan anak)	174.997.243,06			<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia pada tahun berkenan</i>
Sasaran Statgis 2				AKUMULASI POIN PENILAIAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) YANG TERPENUHI	611,6	701	947.720.769,00	780	968.854.942,15	810	1.005.865.200,94	810	2.922.440.912,09			JUMLAH POIN PENILAIAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)

RENSTRA DPPKBPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Sasaran Program 5	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Khusus Anak	2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Presentase Lembaga PHA yang Berkualitas	55,93	60	429.066.100,00	70	438.634.274,03	80	455.390.103,30	80	1.323.090.477,33	Kabid Perlindungan Anak		Jumlah lembaga PHA yang di bentuk di tambah jumlah lembaga PHA
	Meningkatnya Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak & Kualitas Hidup Anak	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga PHA Yang Aktif	100	100	110.000.000,00	100	112.453.000,00	100	116.748.704,60	100	339.201.704,60			Jumlah lembaga PHA yg aktif dibagi Jumlah lembaga PHA x 100%
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen (sosialisasi KLA)	5 Dokumen (sosialisasi KLA)	110.000.000,00	5 Dokumen (sosialisasi KLA)	112.453.000,00	5 Dokumen (sosialisasi KLA)	116.748.704,60	15 Dokumen (sosialisasi KLA)	339.201.704,60			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berkenan
	meningkatkan jumlah lembaga PHA	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pembentukan Lembaga PHA	100	100	319.066.100,00	100	326.181.274,03	100	338.641.398,70	100	983.888.772,73			Jumlah lembaga PHA yg baru dibentuk dibagi Jumlah lembaga PHA yg telah di bentuk x 100%
	Terlaksananya Forum Anak Tingkat Kabupaten	2.08.06.2.01.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	80.000.000,00	30 Orang	81.784.000,00	30 Orang	84.908.148,80	90 Orang	246.692.148,80			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berkenan

RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2.08.06.2.0 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen (sosialisasi konvensi hak anak dan forum anak)	2 Dokumen (sosialisasi konvensi hak anak dan forum anak)	239.066.100,00	2 Dokumen (sosialisasi konvensi hak anak dan forum anak)	244.397.274,03	2 Dokumen (sosialisasi konvensi hak anak dan forum anak)	253.733.249,90	6 Dokumen (sosialisasi konvensi hak anak dan forum anak)	737.196.623,93			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berkenan
Sasaran Program 6	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Khusus Anak	2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase Kasus Kekerasan Anak Yg terselesaikan	100	100	518.654.669,00	100	530.220.668,12	100	550.475.097,64	100	1.599.350.434,76	Kabid Perlindungan Anak		Jumlah Kasus kekerasan anak yang terlayani dibagi jumlah kasus kekerasan anak x 100%
	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Anak	2.08.07.2.0 1.02	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilaksanakan	13	16	50.000.000,00	20	51.115.000,00	23	53.067.593,00	100	154.182.593,00			Jumlah Frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilaksanakan
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	2.08.07.2.0 1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Dokumen (sosialisasi pencegahan KTA)	13 Dokumen (sosialisasi pencegahan KTA)	50.000.000,00	13 Dokumen (sosialisasi pencegahan KTA)	51.115.000,00	13 Dokumen (sosialisasi pencegahan KTA)	53.067.593,00	39 Dokumen (sosialisasi pencegahan KTA)	154.182.593,00			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berkenan

RENSTRA DPPKBPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Meningkatnya Upaya Pencegahan, Penyediaan Lay. Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Lay. Bagi Anak Yg Memerlukan Perlindungan Khusus	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Perlindungan Khusus Anak Yang Aktif	100	100	201.348.669,00	100	205.838.744,32	100	213.701.784,35	100	620.889.197,67		Jumlah lembaga penyedia perlindungan khusus anak yg aktif dibagi Jumlah lembaga penyedia perlindungan khusus anak yg dibentuk x 100%	
		2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	45.000.000,00	30 Orang	46.003.500,00	30 Orang	47.760.833,70	90 Orang	138.764.333,70		Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berkenan	
	Terlaksananya Layanan Pengaduan dan Penanganan Kasus Kekerasan Anak	2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Layanan	30 Layanan	90.350.000,00	30 Layanan	92.364.805,00	30 Layanan	95.893.140,55	90 Layanan	278.607.945,55		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berkenan	

RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2.08.07.2.0 2.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen (workshop dan bimbingan teknis)	2 Dokumen (workshop dan bimbingan teknis)	65.998.669,00	2 Dokumen (workshop dan bimbingan teknis)	67.470.439,32	2 Dokumen (workshop dan bimbingan teknis)	70.047.810,10	6 Dokumen (workshop dan bimbingan teknis)	203.516.918,42			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berkenan
	Meningkatnya Kualitas Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak	2.08.07.2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas PPPA Yang Terampil	15 orang	25 Orang	267.306.000,00	40 Orang	273.266.923,80	60 Orang	283.705.720,29	60 Orang	824.278.644,09			Jumlah Satgas PPPA Yang mengikuti pelatihan
	Terlaksananya Pembinaan Satgas PPA dalam Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak	2.08.07.2.0 3.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen (pembinaan jaringan dan jejaring lembaga penyedia yang di laksanakan)	2 Dokumen (dukungan manajemen UPTD dan pelatihan manajemen)	85.000.000,00	8 Dokumen (pembinaan jaringan dan jejaring lembaga penyedia yang di laksanakan)	86.895.500,00	8 Dokumen (pembinaan jaringan dan jejaring lembaga penyedia yang di laksanakan)	90.214.908,10	18 Dokumen (pembinaan jaringan dan jejaring lembaga penyedia yang di laksanakan)	262.110.408,10			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berkenan

RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2.08.07.2.0 3.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen (dukungan manajemen UPTD dan pelatihan manajemen)	2 Dokumen (dukungan manajemen UPTD dan pelatihan manajemen)	102.306.000,00	2 Dokumen (dukungan manajemen UPTD dan pelatihan manajemen)	104.587.423,80	2 Dokumen (dukungan manajemen UPTD dan pelatihan manajemen)	108.582.663,39	6 Dokumen (dukungan manajemen UPTD dan pelatihan manajemen)	315.476.087,19		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berkenan	
		2.08.07.2.0 3.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen (Workshop/Bimbingan Teknis)	2 Dokumen (Workshop/Bimbingan Teknis)	80.000.000,00	2 Dokumen (Workshop/Bimbingan Teknis)	81.784.000,00	2 Dokumen (Workshop/Bimbingan Teknis)	84.908.148,80	6 Dokumen (Workshop/Bimbingan Teknis)	246.692.148,80		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berkenan	
MENINGKATNYA REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		B		B		B		B	-		Indeks RB Hasil PMPRB	
MENINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH				Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB	A	7.008.271.952,00	A	7.160.096.416,53	A	7.433.612.099,64	A	21.601.980.468,17		Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh APIP pada LHE AKIP Perangkat Daerah	

RENSTRA DPPKBPPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Sasaran Program ke-1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	28,25	28,90	7.008.271.952,00	29,00	7.160.096.416,53	29,15	7.433.612.099,64	29,15	21.601.980.468,17	Sekretaris	Nilai komponen perencanaan kinerja pada LHE AKIP Perangkat Daerah	
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11,1	11,86		12,75		13,45		13,45			Sekretaris	Nilai komponen pelaporan kinerja pada LHE AKIP Perangkat Daerah
Sasaran Program ke-2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI		0		0		0		0		Sekretaris	Jumlah temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah di bagi seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	
Sasaran Program ke-3	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		64		67		70		70		Sekretaris	Hasil Penguruan IP ASN Perangkat Daerah oleh BKPSDMD	
Sasaran Program ke-4	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah		3		3		4		4		Sekretaris	Nilai persepsi berdasarkan Hasil survey internal terhadap pelayanan Bidang Sekretariat Perangkat Daerah (dari 1 sampai 4)	
Sasaran Program ke-5	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik		100		100		100		100		Sekretaris	Jumlah Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh Barang Milik Daerah dlm inventaris Perangkat Daerah x 100%	

RENSTRA DPPKBPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	2.08.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	100%	40.000.000,00	100%	40.892.000,00	100%	42.454.074,40	100%	50.995.892,63			Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun perangkat daerah sesuai standar dibagi jumlah seluruh dokumen perencanaan kinerja yang harus disusun perangkat daerah sesuai standar x 100 persen
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%				Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun perangkat daerah sesuai standar dibagi jumlah seluruh dokumen pelaporan kinerja yang harus disusun perangkat daerah sesuai standar x 100 persen
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.08.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	10 Dokumen	20.446.000,00	10 Dokumen	21.227.037,20	30 Dokumen	61.673.037,20			Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun pada tahun berkenaan dibagi jumlah semua dokumen perencanaan kinerja yang harus disusun pada tahun berkenaan x 100%
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.08.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan	20.000.000,00	10 Laporan	20.446.000,00	10 Laporan	21.227.037,20	30 Laporan	61.673.037,20			Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun pada tahun berkenaan dibagi jumlah semua dokumen pelaporan kinerja yang harus disusun pada tahun berkenaan x 100%

RENSTRA DPPKBPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional			
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp								
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	<i>Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah</i>	2.08.01.2.02.	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar</i>	100%	100%	4.410.000.000,00	100%	4.508.343.000,00	100%	4.680.561.702,60	100%	13.598.904.702,60			<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dibagi jumlah seluruh laporan keuangan yang harus disusun oleh Perangkat Daerah x 100%</i>			
	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.08.01.2.02.01	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	33 Orang	33 Orang	4.410.000.000,00	33 Orang	4.508.343.000,00	33 Orang	4.680.561.702,60	33 Orang	13.598.904.702,60			<i>Jumlah ASN Perangkat Daerah yang menerima gaji dan tunjangan pada tahun berkenaan</i>			
	<i>Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai</i>	2.08.01.2.05	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap</i>	30%	30%	126.957.500,00	30%	129.788.652,25	30%	134.746.578,77	30%	391.492.731,02			<i>Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengenakan atribut lengkap dibagi jumlah seluruh pegawai perangkat daerah x 100%</i>			
	<i>Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</i>			<i>Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian</i>	100%	100%		100%		100%				100%					<i>Jumlah pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh pegawai perangkat daerah x 100%</i>
	<i>Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>			<i>Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	100%	100%		100%		100%				100%		100%			

RENSTRA DPPKBPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.08.01.2.0 5.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket (75 Stel)	1 Paket (75 Stel)	69.457.500,00	1 Paket (75 Stel)	71.006.402,25	1 Paket (75 Stel)	73.718.846,82	3 Paket (225 Stel)	214.182.749,07			Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan pada tahun berkenaan
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.08.01.2.0 5.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang (2 orang laki-laki, 6 orang perempuan)	8 Orang (2 orang laki-laki, 6 orang perempuan)	57.500.000,00	8 Orang (2 orang laki-laki, 6 orang perempuan)	58.782.250,00	8 Orang (2 orang laki-laki, 6 orang perempuan)	61.027.731,95	24 Orang (6 orang laki-laki, 18 orang perempuan)	177.309.981,95			Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun berkenaan
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	2.08.01.2.0 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100%	100%	125.000.000,00	100%	127.787.500,00	100%	132.668.982,50	100%	385.456.482,50			
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.08.01.2.0 6.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	12 Laporan	127.787.500,00	12 Laporan	132.668.982,50	36 Laporan	385.456.482,50			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berkenaan
	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	2.08.01.2.0 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	1.170.639.452,00	100%	1.196.744.711,78	100%	1.242.460.359,77	100%	3.609.844.523,55			
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.08.01.2.0 8.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.118.345.000,00	12 Laporan	1.143.284.093,50	12 Laporan	1.186.957.545,87	36 Laporan	3.448.586.639,37			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada tahun berkenaan
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.08.01.2.0 8.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	52.294.452,00	12 Laporan	53.460.618,28	12 Laporan	55.502.813,90	36 Laporan	161.257.884,18			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berkenaan

RENSTRA DPPKBPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.08.01.2.0 8.04	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	36 Laporan	-			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berkenaan
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	2.08.01.2.0 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset perangkat daerah	19 Unit	572.675.000,00	18 Unit	580.985.652,50	19 Unit	603.179.304,43	56 Unit	1.756.839.956,93			Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh barang milik daerah yang ada pada inventaris perangkat daerah x 100%	
		2.08.01.2.0 7.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	275.625.000,00	1 Unit	281.771.437,50	1 Unit	292.535.106,41	3 Unit	849.931.543,91			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun berkenaan	
		2.08.01.2.0 7.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	22.050.000,00	2 Paket	22.541.715,00	2 Paket	23.402.808,51	6 Paket	67.994.523,51			Jumlah Paket Mebel yang di adakan pada tahun berkenaan	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2.08.01.2.0 7.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	75.000.000,00	15 Unit	76.672.500,00	15 Unit	79.601.389,50	45 Unit	231.273.889,50			Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan pada tahun berkenaan	
			Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang diadakan	1 Unit	200.000.000,00	0	200.000.000,00	1 Unit	207.640.000,00	2 Unit	607.640.000,00			Jumlah bangunan gedung kantor yang diadakan pada tahun berkenaan	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	2.08.01.2.0 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	563.000.000,00	100%	575.554.900,00	100%	597.541.097,18	100%	1.736.095.997,18			Jumlah barang milik daerah yang dipelihara pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh barang milik daerah x 100%	

RENSTRA DPPKBPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Draft Rancangan Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	definisi oprasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.08.01.2.0 9.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	333.000.000,00	6 Unit	340.425.900,00	6 Unit	353.430.169,38	6 Unit	1.026.856.069,38		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan perangkat daerah yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya pada tahun berkenaan	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.08.01.2.0 9.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	46 Unit	30.000.000,00	46 Unit	30.669.000,00	46 Unit	31.840.555,80	46 Unit	92.509.555,80		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang pelihara pada tahun berkenaan	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.08.01.2.0 9.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	204.460.000,00	1 Unit	212.270.372,00	2 Unit	616.730.372,00		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi pada tahun berkenaan	

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 Melalui IKU

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja Utama yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja Utama adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja Utama menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Target indikator kinerja Utama perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Utama perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

**Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama DP2KBP3A yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026**

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Cakupan Peserta Keluarga Berencana Aktif	%	86	87,05	89,75	91,25	91,25
2	Cakupan pasangan usia subur Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%	%	1,8	1,75	1,7	1,6	1,6
3	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-Keluarga Berencana tidak terpenuhi (Unmet Need) 12 %	%	9	8,5	8,15	7,85	7,85
4	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	5,31	5,11	4,91	4,71	4,71
6	Rasio Akseptor Keluarga Berencana	rasio	74,84	74,84	75,15	76,00	76,00

RENSTRA DPPKBPPA KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
7	Rata rata jumlah anak per keluarga	%	1,8	1,72	1,72	1,7	1,7
8	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100	100	100
9	Rasio KDRT	Rasio	0,17	0,15	0,14	0,13	0,13
10	Skor Kabupaten Layak Anak	Point	618	750	800	900	900
11	Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	%	60	80	85	90	90
12	Indek Pembangunan Gender (IPG)	%	87,17	87,4	87,5	88	88
13	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	%	61,32	62,45	62,75	63	63
14	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Nilai	28,25	28,90	29,00	29,15	29,15
15	Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Nilai	11,1	11,86	12,75	13,45	13,45
16	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BFK-RI	%	0	0	0	0	0
17	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	%		64	67	70	70
18	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Rasio		3	3	4	4
19	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	%		100	100	100	100

7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kunci (IKK) Bagi PD Pemangku Urusan Pemerintah Daerah

Kinerja perangkat daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian Kinerja perangkat daerah secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja perangkat daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator).

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah indikator outcome yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci merupakan indikator kinerja menurut Permendagri 86 Tahun 2017 yang disempurnakan pada indikator urusan pelayanan umumnya melalui Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya dalam Renstra Perangkat Daerah DP2KBP3A Kabupaten Bangka

diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.2
Penetapan Target Indikator Kinerja DP2KBP3A Tahun 2024-2026

No	Indikaor Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi awal 2022	Target		
				2024	2025	2026
I	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
A.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1.	Angka Kelahiran Total / <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	Angka	2,33	2,31	2,29	2,28
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	73,42	76,75	77,15	77,95
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	16,68	9,50	9,25	9,00
B.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1.	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	%	9,08	12,50	12,90	13,13
2.	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Kabupaten/Kota	%	0,025	0,023	0,022	0,021
3.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	Rasio	0,010	0,009	0,009	0,008

**BAB VIII
PENUTUP**

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024 - 2026 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024 - 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024-2026 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah tahun 2024 - 2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat Nasional dan atau Daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sungailiat, 10 April 2023
Kepala DP2KBP3A Kab. Bangka,



NURITA, S.Sos
PEMBINA Tk.I
NIP. 19641103 198903 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat: Jalan Pemuda No. 2 Sungailiat Kode Pos 33215 Telepon (0717) 92055

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGKA

NOMOR :188.4/74/DP2KBP3A/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026

KEPALA DP2KBP3A KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen atas program/kegiatan dalam pencapaian dan tujuan organisasi selama tahun 2024 – 2026, dipandang perlu membuat dokumen Rencana Strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka tahun 2024 – 2026;
- b. Bahwa untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka tahun 2024 – 2026 sesuai Intruksi Mendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

13. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
30. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
31. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
34. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
35. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
43. Peraturan Bupati Bangka Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A Kabupaten Bangka.
44. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
45. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2026 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka tahun 2024 – 2026 dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka 2024 – 2026.
 - b. Menyajikan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka 2024 – 2026.
 - c. Menyusun rencana akhir Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka 2024 – 2026.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dictum KEDUA dalam melaksanakan tugas tidak diberikan honor.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 06 Desember 2022

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGKA,**



NURITA, S.Sos

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGKA
NOMOR: 188.4/ /DP2KBP3A/ 2022

Tanggal : 06 Desember 2022

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BANGKA TAHUN 2024-2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026**

- Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Bangka
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Bangka
- Anggota : 1. Perencana Ahli Muda
2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
3. Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana
Ketahanan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga
Sejahtera
4. Kepala Bidang Perlindungan Anak
5. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGKA,**



NURITA, S.Sos

**JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
1	SK Tim Penyusun Renstra PD	6 Desember 2022	
2	Penyusunan Rancangan Renstra PD	6 Desember 2022- Februari 2023	
3	Verifikasi Rancangan Renstra PD oleh Bappeda	6-8 Februari 2023	
4	Penyusunan draft Ranhir Renstra PD	9 Februari-10 Maret 2023	
5	Penetapan RPD Kab. Bangka Tahun 2024-2026	10 Maret 2023	
6	Verifikasi dan Penyempurnaan Draft Ranhir Renstra PD	10-14 Maret 2023	
7	Penetapan Ranhir Renstra PD	15 Maret 2023	
8	Reviu Ranhir Renstra PD oleh APIP	16-31 Maret 2023	
9	Pengajuan Rancangan Perkada Renstra PD	3 April 2023	
10	Harmonisasi Rancangan Perkada	4-10 April 2023	
11	Penetapan Perkada tentang Renstra PD	10 April 2023	